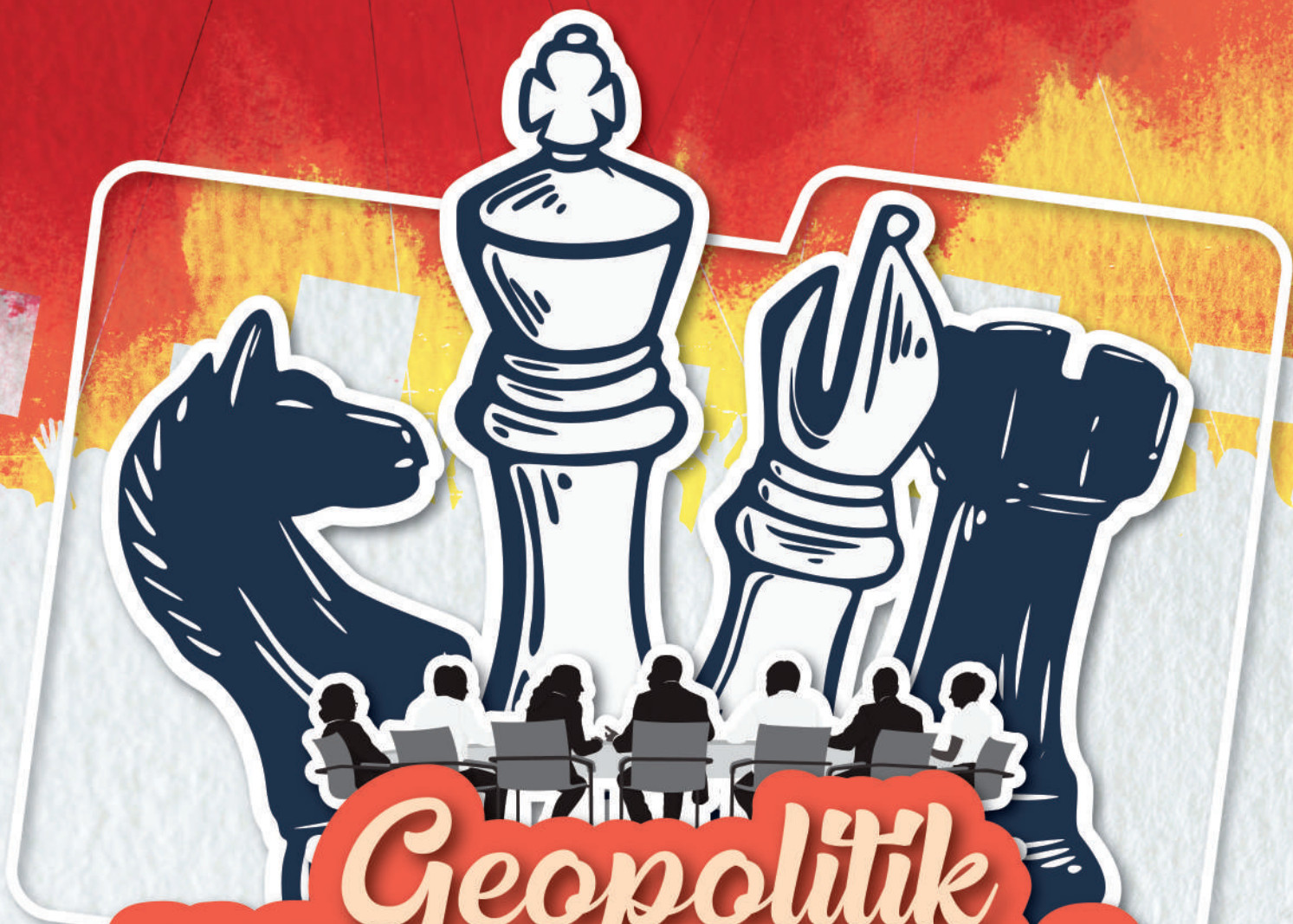


ARSIP

MEDIA KEARSIPAN NASIONAL


ANRI
ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Geopolitik INDONESIA dalam Arsip

*Terima kasih
atas kerja sama semua pihak*

ARSIP NASIONAL RI

Kembali dinobatkan sebagai Badan Publik

INFORMATIF

oleh **KOMISI INFORMASI PUSAT RI**



RUBRIK

4 DARI REDAKSI

10 ARTIKEL LAPORAN UTAMA

ARSIP ASEAN MENUJU MEMORI DUNIA,
PENOMINASIAN ARSIP LAHIRNYA ASEAN PADA
REGISTER MEMORY OF THE WORLD UNESCO

PEMBENTUKAN FORUM KERJA SAMA
ARSIP NASIONAL NEGARA-NEGARA
BERPENDUDUK MAYORITAS MUSLIM

14 KHAZANAH

TO BUILD THE WORLD ANEW
ARSIP PIDATO PRESIDEN SUKARNO UNTUK
DUNIA DI PBB 1961 SEBAGAI *MEMORY OF*
THE WORLD UNESCO REGISTER

INDONESIA DAN PALESTINA
DALAM CATATAN ARSIP

21 PROFIL

ANDI MAKMUR MAKKA
AKTIVIS, JURNALIS, DAN PENULIS
YANG BERJIWA ARSIPARIS

28 MANCANEGARA

MENJELAJAHI *PRESIDENTIAL LIBRARIES*
AND MUSEUMS AMERIKA SERIKAT:
BELAJAR ARSIP KEPRESIDENAN
DARI PAMAN SAM

32 DAERAH

MELESTARIKAN KEBUDAYAAN
MELALUI KEARSIPAN:
KISAH SUKSES YOGYAKARTA

38 HUKUM

MEMPERKUAT GEOPOLITIK INDONESIA
MELALUI IMPLEMENTASI REGULASI
PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

42 CERITA KITA

GERIMIS SENJA HARI

44 LIPUTAN



LAPORAN UTAMA 5

GEOPOLITIK INDONESIA DALAM ARSIP



PRESERVASI 24

PRESERVASI DIGITAL DAN PENERAPANNYA
DENGAN APLIKASI DROID



TEKNOLOGI 36

VIDEO SPECTRAL COMPARATOR:
GAWAI PEMBANTU PENENTU
AUTENTISITAS ARSIP



Desain sampul : Aswin Budiarto

Pembina :

Kepala ANRI,
Sekretaris Utama,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab :

Florentinus Kristiartono

Pemimpin Redaksi :

Aria Maulana

Dewan Redaksi :

Hilman Rosmana
Bambang Parjono Widodo
M. Ihwan

Redaktur :

Susanti
Isanto
Intan Lidwina
Tiara Kharisma
Mudanto Pamungkas
Jajang Nurjaman
Erieka Nurlidya Utami

Editor :

Rayi Darmagara
Sitty Annisaa
Yosa Wisnu W.
Yuanita Utami
Rizal Bagus Rahman
Anwar Asyraf

Desain Grafis :

Hendri E. Zulkarnain
Aswin Budiarto
Wahyu Setyo Budi
Rani Rizki Amalia

Fotografer :

Muhamad Dullah
Lukman Nul Hakim

Sekretariat :

Krestiana Evelyn
Putri Iswayanti
Ayatulloh Nur Amin

 www.anri.go.id

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id

Kondisi politik global yang terjadi saat ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius para pemangku kepentingan. Isu-isu strategis global yang saat ini menyita perhatian dunia, yakni adanya eskalasi tensi geopolitik, perang di beberapa negara, perubahan iklim, *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan, krisis pangan, krisis energi, dan demografi. Adanya peristiwa-peristiwa global yang terjadi saat ini akan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Dalam menetapkan kebijakan politik luar negeri, sejatinya pengambil keputusan perlu mempertimbangkan data-data dan fakta serta mengelaborasi dengan latar belakang historis Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arsip-arsip yang tersimpan, dapat dilihat bahwa pemikiran-pemikiran geopolitik dan geostrategis para pendiri bangsa, yakni tidak memihak salah satu kubu dan bebas menentukan sikap dalam konflik internasional, sudah dilakukan di masa lalu.

Pada tema kali ini majalah ARSIP mengangkat tema Geopolitik Indonesia dalam Arsip. Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Daerah, Rubrik Preservasi, Rubrik Profil, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi





Geopolitik INDONESIA dalam Arsip

Dinamika politik global yang terjadi saat ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius para pemangku kepentingan. Isu-isu strategis global yang saat ini menyita perhatian dunia, yaitu adanya eskalasi tensi geopolitik, perang di beberapa negara, perubahan iklim, *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan, krisis pangan, krisis energi, dan demografi. Adanya peristiwa-peristiwa global yang terjadi saat ini akan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Situasi politik global yang bergejolak saat ini pada dasarnya bukanlah sebuah kondisi yang terpisah dari lingkungan strategis nasional Indonesia, melainkan saling terkait dan berpengaruh satu sama lain.

Dalam menetapkan kebijakan politik luar negeri, sejatinya pengambil keputusan perlu mempertimbangkan data-data dan fakta, serta mengelaborasi dengan latar belakang historis Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Indonesia dalam geopolitik dinamika global yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri yang merupakan kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Indonesia sendiri menerapkan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam menentukan sikap terhadap permasalahan internasional.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, istilah geopolitik dan geostrategi pertama

digunakan oleh kalangan elit Eropa dalam menggambarkan pertarungan kepentingan antar entitas Eropa dan dunia saat itu, berkaitan dengan studi interaksi antarkekuasaan kelompok manusia dengan memperhatikan realitas geografis yang dihadapinya. Konsep yang mirip sebenarnya telah berkembang di Nusantara dan itu dapat kita ketahui dalam naskah kuno Nusantara. "Dalam naskah keraton Surakarta, yaitu surat Susangko Jati Raden Sunarto Sastrowidjoyo pernah menyampaikan gagasan, ia bilang dapat wangsit, dapat ilmu bahwa interasi unsur-unsur alam seperti api, air, angin dan tanah yang berada di suatu wilayah sangat memengaruhi pembentukan karakter dan kondisi fisik penduduk yang mendiami wilayah tersebut, karakter dan kondisi fisik merupakan salah satu yang menjadi

studi penting dari geopolitik,” jelasnya.

Dalam menjalankan politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif, setidaknya Indonesia berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila, landasan regulasi yang meliputi: UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang segala bentuk perjanjian internasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 mengenai sistem di dalam perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya langkah-langkah untuk mencapai kemajuan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada UUD 1945 khususnya yang tercantum dalam alinea pertama dan keempat pembukaan UUD 1945, alinea pertama yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan. Kemudian, alinea keempat menyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, kebijakan luar negeri berpegang teguh pada Pancasila yang menjadi ideologi negara dan merupakan pedoman hidup bangsa. Oleh karenanya, dalam membentuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan kelima prinsip Pancasila. Selain UUD 1945, Pancasila, dan landasan regulasi politik luar negeri Indonesia yang sifatnya dinamis karena mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada masanya.

Setiap zaman memiliki kondisi, tantangan, dan capaiannya masing-masing dalam keterlibatannya dalam politik global. Pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno, Indonesia terkenal mendapat perhatian dunia internasional. Bukan hanya keaktifannya dan juga peranannya di kancah internasional tetapi ide-ide, serta kebijakan luar



P. Kepala ANRI Imam Gunarto

negerinya yang menjadi panutan beberapa negara pada saat itu. Gagasan Sukarno muda tentang kemerdekaan tidak terlepas dari konstelasi politik internasional ketika itu, saat gagasan-gagasan anti-imperialisme di berbagai penjuru dunia yang begitu bergelora. Pidato pembelaan “Indonesia Menggugat” yang ditulis dan dibacakan Bung Karno pada persidangan tahun 1930 menjadi bukti nyata pandangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme yang dimiliki Sukarno. Pidato itu menggugat praktik imperialisme dan kolonialisme yang merusak negeri jajahan, termasuk Indonesia. Tonggak sejarah terpenting Sukarno lainnya adalah 1 Juni 1945, ketika ia membacakan rumusan dasar negara Pancasila di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Selanjutnya, Bung Karno juga turut serta dalam memelopori Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang menjadi tonggak semakin kuatnya pengaruh Sukarno di dunia internasional. KAA merupakan jalan masuk Bung Karno dalam pergerakan semangat nasionalisme Asia dan Afrika, sekaligus awal dari pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB). Selain itu,

kiprah terpenting Sukarno yang paling mengguncang dunia internasional adalah pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-15 pada 30 September 1960 yang berjudul *To Build the World Anew*.

Dosen Ilmu Pertahanan RI, praktisi geopolitik, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa pidato “*To Build the World Anew*” merupakan esensi dari harapan dan mimpi seluruh bangsa-bangsa dunia yang mengalami penindasan dan penjajahan. “Dalam cara pandang Sukarno, dunia internasional pada waktu itu selalu diwarnai oleh peperangan, sehingga konsepsi dari pidato “*To Build the World Anew*” adalah realitas peradaban umat manusia sedunia yang diwarnai oleh penindasan dan Indonesia selama 350 tahun mengalami makna kolonialisme dan imperialisme. Apa yang disampaikan Presiden Sukarno ternyata relevan sampai dengan saat ini bahwa di tengah pertarungan geopolitik itu jiwa kemanusiaan tetap berbicara,” terang Hasto Kristiyanto.

Selain itu, Hasto Kristiyanto juga menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Sukarno tidak hanya diperuntukan untuk rakyat Indonesia, tetapi harus menjadi bagian dari perjuangan umat manusia sedunia untuk bebas dari kolonialisme dan imperialisme, serta menjadi bagian penting dari persaudaraan dunia. Ia menambahkan bahwa konsepsi utama dari pidato Presiden Sukarno adalah untuk memberikan perubahan progresif untuk lebih mengutamakan kemanusiaan pada PBB yang didirikan dalam nuansa konflik Perang Dunia II dan masih dalam pengaruh persaingan geopolitik negara-negara besar.

Hasto Kristiyanto menerangkan bahwa dengan riset di ANRI banyak informasi penting ditemukan tentang geopolitik Presiden Pertama RI Sukarno alias Bung Karno yang membicarakan tentang ilmu kepemimpinan Indonesia dan

dunia. Hasto menceritakan saat menyusun disertasinya, banyak menemukan contoh arsip pada masa lalu bagaimana Sukarno dalam membangun suatu *the power of Indonesian diplomacy*. Di mana Indonesia betul-betul memiliki suatu wawasan geopolitik yang luar biasa. Contoh temuan-temuan arsip yang sangat penting, penyelenggaraan KAA termasuk Indonesia dalam keputungan pangkalan militer negara-negara barat.

Hasto pun menyebut dengan melihat dokumen di ANRI bisa memberi inspirasi akan kepemimpinan Indonesia untuk menghadapi masa depan. "Dokumen-dokumen dan arsip yang ada di sini (ANRI), diskursus tentang geopolitik dan kepemimpinan Indonesia bagi dunia itu betul-betul mendorong seluruh daya gerak anak bangsa kita untuk bertindak ke luar, bukan ke dalam sesama anak bangsa sendiri, sehingga kepemimpinannya sangat jelas dari arsip yang ditemukan di sini," ungkap Hasto.

Hal itu diperkuat oleh Imam Gunarto yang menyampaikan bahwa Presiden Pertama RI Sukarno memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat strategis dan masih relevan dengan kondisi global saat ini. "Bung Karno memandang bahwa pemahaman terhadap geopolitik bagi para pembuat keputusan, bagi para pemimpin bangsa dan kita semua sangatlah penting, dan Bung Karno memberikan banyak contoh-contoh dan ajaran yang sangat jelas terkait geopolitik dan geostrategis, semua contoh dan ajaran-ajaran tersebut tersimpan dengan baik di dalam arsip," terangnya.

"Berkaitan dengan situasi politik yang sedemikian agak rawan, pemahaman kita tentang geopolitik dan geostrategi perlu ditingkatkan dan masalah perjuangan mempertahankan bangsa itu bukan tanggung jawab tentara saja, tapi semua komponen masyarakat harus memahaminya dan harus ikut serta melakukan itu," terang Imam Gunarto.



Dosen Ilmu Pertahanan (Unhan) RI, Praktisi Geopolitik, Dr. Hasto Kristiyanto

Pada masa Orde Baru pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara efektif. Peranan Indonesia pada masa Orde Baru terlihat jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat dunia. Kerja sama diperluas dalam berbagai sektor terutama sektor perekonomian, Indonesia juga secara cepat memberikan tanggapan akan isu-isu yang muncul dalam dunia internasional. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif pada masa Orde Baru dapat membawa Indonesia baik di mata dunia. Indonesia mulai memperbaiki citra dan hubungannya dengan cara kembali bergabung dalam organisasi PBB, serta mencetuskan konsep *good neighbourhood policy*. Realisasi konsep politik *good neighbourhood policy* dilakukan dengan cara membentuk ASEAN pada tahun 1967 bersama Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina.

Pada awal reformasi, B.J. Habibie menerapkan kebebasan pers dan liberalisasi partai politik demi memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), politik luar negeri yang diterapkan Indonesia adalah diplomasi persatuan. Kebijakan tersebut berupa kunjungan perjalanan

internasional Gus Dur menuju lebih dari 80 negara untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Diplomasi ke negara-negara lain juga diterapkan pada masa pemerintahan Megawati tahun 2001-2004. Sementara itu, Megawati tercatat melakukan enam kali pergi ke luar negeri untuk mengunjungi 27 negara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan internasional dalam masalah disintegrasi bangsa dan kasus pelanggaran HAM terkait gerakan separatisme daerah. Semasa menjabat Presiden RI, Megawati Soekarnoputri pernah terlibat dalam diplomasi antara dua negara yang berkonflik, Korea Selatan dan Korea Utara. Ia turut membantu menggalang upaya reunifikasi kedua negara tersebut.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden RI yang pertama kali dipilih dalam proses pemilihan langsung pada Pemilu tahun 2004. Pada masa pemerintahan SBY, kondisi politik dan ekonomi RI sudah mulai kembali stabil. Periode kepemimpinan SBY pun cukup panjang, yakni dua periode atau 10 tahun (2004-2009 dan 2009-2014). Pada masa ini, Indonesia

sukses menyelesaikan beberapa masalah internasional seperti kasus *illegal logging*, kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia dan masalah perbatasan di kepulauan Ambalat. Selain itu, politik luar negeri Indonesia masa SBY juga berusaha untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tingkat internasional. Di masa pemerintahan SBY, RI meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai isu *global governance* dan forum multilateral. Indonesia berupaya menjadi aktor penting politik dunia dengan membawa identitas baru, yakni negara demokrasi dengan penduduk mayoritas muslim.

Sementara itu di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), peran Indonesia di dunia internasional terlihat semakin meningkat dalam beberapa tahun ini. Peningkatan kapasitas politik luar negeri itu tidak terlepas dari misi politik luar negeri Indonesia. Wajah politik luar negeri Indonesia semakin terlihat eskalasinya di kancah internasional di mana Presiden Jokowi menghadiri secara langsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja. Di pertemuan KTT ASEAN di Kamboja itu juga Indonesia ditetapkan sebagai Ketua ASEAN 2023. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 yang berlangsung di Bali, pada 15-16 November 2022. kedua ajang pertemuan tingkat tinggi tersebut sangat penting dan strategis bagi Indonesia. Dalam tataran hubungan internasional, peran aktif Presiden Jokowi telah meningkatkan posisi dan peran Indonesia sebagai aktor kunci hubungan antarnegara, baik dalam tataran regional maupun global. kepemimpinan Indonesia juga terlihat dalam inisiatif-inisiatif G20 untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya mulai dari krisis pangan, krisis energi, dan keuangan. Demikian pula dengan kegiatan KTT G20. Puncak pertemuan akbar pemimpin dunia di Pulau Dewata tersebut menjadi momentum Indonesia menunjukkan



Pengamat militer, pertahanan,
Ketua Dewan Pakar Komite
Arsip Kemaritiman ANRI,
Dr. Connie Rahakundini

**Arsip itu
menjadi penting
karena membuat
kita disegani
dan mempunyai
pride serta
kepercayaan diri
atas apa yang
dibicarakan**

perannya di mata internasional. Konsistensi dan kekukuhan sikap Presiden dalam mengupayakan perdamaian dan mendorong langkah-langkah penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina sangat perlu diapresiasi. Bahkan, Presiden Jokowi hadir langsung di wilayah konflik dan bertemu dengan kedua pemimpin negara tersebut.

Dalam paparan pada seminar nasional bertema Marwah Geopolitik dan Geostrategi dalam Arsip,

Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana menekankan pentingnya peran ANRI bagi posisi Indonesia dalam konstelasi geopolitik dan geostrategi internasional. Menurutnya, arsip juga menjadi bahan kajian di masa lalu bagi kebijakan saat ini dan masa mendatang.

Dalam arsip-arsip yang tersimpan, dapat dilihat bahwa pemikiran-pemikiran geopolitik dan geostrategis para pendiri bangsa, yakni tidak memihak salah satu kubu dan bebas menentukan sikap dalam konflik internasional, sudah diperkenalkan puluhan tahun silam. Sampai hari ini pun kebijakan tersebut masih dijalankan.

“Jadi inilah pentingnya arsip. Saya melihat arsip ini yang menjaga kita untuk konsisten dengan kebijakan ini,” jelas Profesor Hikmahanto saat seminar. Ia menambahkan, hal tersebut akan menjadi memori lembaga.

Pengamat Kemaritiman dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan bahwa arsip adalah salah satu senjata baru untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Dengan kekuatan arsip, kita dapat revisit apa yang ingin dicapai. Arsip is a new weapon, saat saya memperjuangkan kedaulatan NKRI di Papua melawan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Arsip adalah senjata yang ampuh untuk menggecilkan nyali mereka. Saat mereka meributkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang palsu, saya langsung menghubungi ANRI untuk minta semua bukti PEPERA bahwa itu (Papua) adalah hak kita, arsip itu menjadi penting karena membuat kita disegani dan mempunyai *pride* serta kepercayaan diri atas apa yang dibicarakan,” tambah Connie R. Bakrie.

Menurut Connie, semua harus tertib arsip maka dalam mencermati

sebuah peristiwa semua dapat terbaca. Apalagi bila menyangkut suatu wilayah konflik atau sengketa wilayah dengan negara tertentu. “Isu arsip sangat strategis meskipun menghadapi tantangan karena terkait arsip belum menjadi budaya karena masih kuatnya budaya tutur,” lanjut Connie R. Bakrie.

Dalam penyelenggaraan kearsipan internasional, ANRI juga terus melakukan upaya-upaya *soft diplomacy* dalam berperan serta mengenalkan kiprah Indonesia di kancah dunia, di antaranya ANRI turut menginisiasikan pembentukan forum kerja sama dengan Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Untuk pertama kalinya, Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk mayoritas Islam, duduk bersama dengan negara-negara muslim lainnya dalam bidang kearsipan. Bentuk kolaborasi ini dapat memperkaya kearsipan nilai dan kultur Islam, serta dapat menjadi penghubung konektivitas sejarah Islam di berbagai belahan dunia.

Kolaborasi dan sinergi antarnegara mayoritas berpenduduk muslim menjadi penting dalam meningkatkan kualitas manajemen, pemanfaatan, dan pengelolaan arsip yang berkelas dunia. Tak hanya itu, hal tersebut juga akan mendapatkan dokumentasi sejarah dunia, khususnya praktik pemerintahan pada negara-negara mayoritas berpenduduk muslim yang akan memperkaya ilmu pengetahuan. “Melalui forum ini, maka usaha-usaha untuk meningkatkan peran Arsip Nasional Negara-negara Berpenduduk Mayoritas Muslim di tingkat internasional dan melestarikan memori kolektif tentang sejarah Islam sebagai bagian dari peradaban dunia menjadi lebih kuat dan hebat,” jelas Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto.

Selain pembentukan forum kerja sama dengan Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, berdasarkan hasil



Pengamat hukum internasional UI,
Rektor Universitas Ahmad Yani, dan
Anggota Dewan Pakar Arsip
Kemaritiman ANRI,
Profesor Hikmahanto Juwana

pertemuan *Executive Council of the Southeast Asia Regional Branch of the International Council on Archives (SARBICA)* pada 20 April dan 13 September 2022 yang dihadiri pimpinan 10 lembaga kearsipan negara-negara ASEAN, disepakati bahwa Arsip Pembentukan ASEAN akan dinominasikan pada register *Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP)* pada siklus nominasi berikutnya. SARBICA menunjuk Indonesia dalam hal ini ANRI sebagai koordinator sekaligus mengoordinasikan kegiatan ini dengan Sekretariat ASEAN dan membentuk sebuah Working Group dalam rangka mempersiapkan nominasi.

Arsip Pembentukan ASEAN memiliki signifikansi regional yang tinggi, khususnya sebagai organisasi regional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas politik keamanan di Kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan dunia pada umumnya. Pembentukan ASEAN merupakan sebuah proses yang berlangsung sejak dideklarasikan pada tahun 1967 hingga akhirnya disepakatinya ASEAN Charter 2007.

“Keberadaan ASEAN sesungguhnya tidak lepas dari spirit KAA/Bandung spirit dan spirit GNB.

ASEAN Way atau cara ASEAN yang mengembangkan cara-cara dialog, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing/non-intervensi, penyelesaian konflik dengan cara damai, musyawarah dan mufakat adalah spirit Bandung, adalah juga Spirit GNB. Apalagi jika kita menarik jauh ke belakang. Sejarah kita sebelum masa kolonial, sebelum abad 16 adalah satu dan dipersatukan oleh budaya dan perdagangan. Asia Tenggara dibentuk oleh perdagangan atau hubungan ekonomi yang kemudian memunculkan adanya hubungan budaya antarmasyarakat. Asia Tenggara merupakan sebuah entitas karena beraneka ragam orang memiliki pengalaman historis yang sama, demikian kata Anthony Reid, dalam bukunya *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1988*,” ungkap Imam Gunarto.

Pada akhirnya, capaian-capaian Indonesia di kancah global harus didokumentasikan dengan baik sebagai bahan pengambilan keputusan dan proses pembelajaran di masa mendatang. Sebagai warisan dokumenter, arsip merupakan jendela dan lorong waktu ke masa lalu untuk menjalani kekinian dan untuk merancang masa depan sebuah khazanah pengetahuan informasi, cerita dan pengalaman yang mencerminkan perjalanan peradaban bangsa. Oleh karenanya, semua pihak untuk bersama-sama melestarikan dan membuka akses terhadap warisan dokumenter geopolitik Indonesia. Bersama-sama kita akan menerangi masa depan dengan cahaya pengetahuan dan masa lalu, dan menjadikan arsip geopolitik Indonesia sebagai jembatan untuk memahami perdamaian dan harmoni di dunia yang semakin kompleks ini. (Ss/Is)



Bening Tri Hanggoro :

ARSIP ASEAN MENUJU MEMORI DUNIA, PENOMINASIAN ARSIP LAHIRNYA ASEAN PADA REGISTER MEMORY OF THE WORLD UNESCO

Pada tahun 2023 Indonesia dipilih untuk memegang keketuaan ASEAN untuk kelima kalinya. Tidak hanya itu Jakarta juga didapuk menjadi tuan Rumah Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN tanggal 5-7 September 2023. Indonesia menjadi bagian penting dari ASEAN dalam perjalanan panjang organisasi bangsa-bangsa kawasan Asia Tenggara ini.

Sebelum terbentuknya ASEAN, Asia Tenggara merupakan episentrum pergolakan politik global akibat persaingan antara Amerika Serikat (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur). Upaya awal perdamaian dan kerjasama regional diluncurkan pada tanggal 31 Juli 1961, dengan dibentuknya Association of Southeast Asia (ASA), sebuah organisasi kerjasama terbatas yang terdiri dari Federasi Malaya, Thailand, dan Filipina.

Rekonsiliasi multilateral di Asia Tenggara ditandai dengan berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia pada bulan Agustus 1966 dan normalisasi hubungan antara Malaysia dan Filipina pada bulan Juni 1966. Untuk mengintegrasikan kawasan lebih lanjut, Indonesia mengajukan gagasan pendirian lembaga kerjasama regional yang lebih permanen kepada Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Kamboja pada pertengahan 1966. Pada akhir tahun 1966, pembentukan organisasi kerjasama regional disepakati oleh Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan

Myanmar. Pada tanggal 8 Agustus 1967, Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok, yang merupakan cikal bakal pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Deklarasi ini menjadi landasan berdirinya organisasi regional Asia Tenggara yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai perbedaan di Asia Tenggara. Deklarasi ini dilakukan oleh menteri luar negeri dari negara-negara tersebut yaitu Narciso Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina), Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia), Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand), Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri Malaysia), dan Sinnathamby Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura).

Sejak deklarasi pertama pembentukan ASEAN pada 1967, keanggotaan ASEAN terdiri dari 5 (lima) negara pelopor yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berikutnya pada 8 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung, kemudian Vietnam pada 28 Juli 1995,

Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999

Selanjutnya, ASEAN didirikan guna mencapai tujuan besar yaitu peningkatan stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta perdamaian, dengan mengatasi perbedaan di antara anggotanya melalui dialog. Sehingga ASEAN dapat menjadi legitimasi kedaulatan negara-negara anggota guna menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN secara signifikan mengubah lanskap politik dan keamanan di Asia Tenggara dan sekitarnya. Didirikan di tengah tingginya Perang Dingin, ASEAN membuktikan bahwa negara-negara dengan kemampuan militer yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara Kekuatan Besar (Great Powers) yang bersaing sebenarnya dapat membuka jalannya sendiri dalam menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan. Sebelum terbentuknya ASEAN, Asia Tenggara, seperti banyak kawasan lain di dunia, rentan terhadap konflik antarnegara. Terjadi defisit kepercayaan, ditambah dengan situasi Perang Dingin yang zero-sum.

Pembentukan ASEAN tidak hanya membentuk sebuah organisasi, namun juga menumbuhkan seperangkat norma yang membantu mengatur perilaku negara-negara di

kawasan, mulai dari diperkenalkannya Zona Damai, Kebebasan dan Netralitas (1971) hingga Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (1976), hingga Perjanjian Zona Bebas Nuklir Asia Tenggara (1995). Hal inilah yang mengembangkan budaya damai, pembuatan konsensus, dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan. Proses ini membantu negara-negara di kawasan, serta negara-negara di luar kawasan yang mempunyai kepentingan di kawasan, mengubah defisit kepercayaan menjadi kepercayaan strategis dan mampu bekerja sama.

Keberadaan ASEAN mulai dari persiapan pendirian sampai berdiri dan eksistensinya semua terekam dalam arsip. Arsip-arsip tersebut tersimpan di masing-masing negara anggota ASEAN. *Southeast Asia Regional Branch of The International Council of Archives (SARBICA)* mengadakan menyelenggarakan *Executive Board Meeting (EBM)* dan *General Conference* dengan salah satu pokok bahasannya adalah kemungkinan Kerjasama penominasian arsip antar bangsa Asia Tenggara pada *Register Memory of the World*.

Memory of the World (MOW)

adalah sebuah program yang diprakarasi oleh UNESCO guna melakukan pendataan/register terhadap memori dunia sejak tahun 1992. Tujuan dari program ini adalah untuk mengakui dan melindungi warisan budaya dan sejarah dunia dalam bentuk naskah, arsip, dan benda-benda berharga lainnya yang memiliki nilai kebudayaan, sejarah, atau ilmiah yang tinggi.

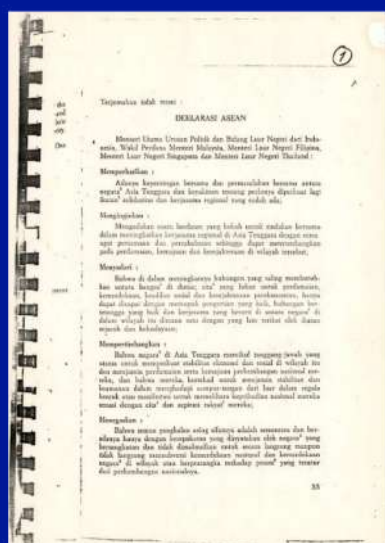
Kemudian baru pada Virtual Special Meeting 20 April 2022 dan 13 September 2023, dihadiri oleh Dewan Eksekutif SARBICA yang terdiri dari Kepala Arsip Nasional dari 10 Negara Anggota ASEAN, diputuskan bahwa SARBICA akan menominasikan arsip pendirian ASEAN dalam *register internasional Memory of The World*, UNESCO pada 2023. Pada pertemuan tersebut juga disepakati ANRI sebagai leading sector dalam penominasian. Arsip Pendirian ASEAN diproyeksikan untuk diajukan dengan metode Nominasi Bersama (*Joint Nomination*) dengan Nominator adalah Negara-negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thai Film Archive.

Arsip yang dipilih untuk dinominasikan adalah Arsip Pendirian

ASEAN, yang merupakan arsip-arsip seputar Deklarasi Bangkok mulai dari persiapan dan penyelenggaraan. Arsip Pembentukan ASEAN terdiri atas 17 berkas arsip tekstual, 1 arsip foto, dan 3 arsip audio. Arsip yang merupakan kenangan kolektif lima penggagas ASEAN yang memiliki signifikansi internasional melahirkan organisasi yang berhasil ikut membantu perdamaian dunia dengan menjaga kestabilan Kawasan di Asia Tenggara. Prinsip utama dalam ASEAN adalah persamaan kedudukan dalam anggota (*equality*), musyawarah (*consensus*), kepentingan bersama (*common interest*) dan saling membantu (*solidarity*).

Hal ini merupakan salah satu usaha keberlanjutan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia yang terekam dalam arsip. Semangat terbentuknya ASEAN sama dengan semangat dari Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok yaitu membuat situasi di dunia lebih baik dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pembentukan ASEAN memiliki nilai penting sebagai contoh keberhasilan dalam mencegah konflik dan mencapai stabilitas di kawasan yang terdapat perbedaan politik dan budaya. Selain itu, pendekatan diplomasi, nilai-nilai yang ditanamkan, dan karakteristik unik ASEAN memberikan pembelajaran berharga bagi kawasan lain di dunia.

Dengan dinominasikannya Arsip Pendirian ASEAN pada Register Memory of the World diharapkan memori kolektif bangsa-bangsa Asia Tenggara khususnya pendiri ASEAN dapat diakui oleh MOW UNESCO dan dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya dunia. Karena arsip ini memiliki arti yang mendalam bagi pemahaman manusia tentang sejarah, budaya, dan perkembangan dunia serta dapat menjadi kekayaan intelektual bagi budaya umat manusia untuk generasi mendatang.



Arsip Deklarasi Bangkok, Terjemahan Tidak Resmi, Koleksi ANRI

Adhie Gesit Pambudi

PEMBENTUKAN FORUM KERJA SAMA ARSIP NASIONAL NEGARA-NEGARA BERPENDUDUK MAYORITAS MUSLIM

Islam telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia selama berabad-abad. Sejak turun pertama kali di jazirah arab, Islam telah menyebar ke banyak negara di berbagai pelosok penjuru dunia hingga saat ini. Semua itu terekam dalam arsip sejarah peradaban Islam yang tersebar sebagai memori kolektif bagi umat muslim dari generasi ke generasi.

Sebagai lembaga pelestari memori kolektif dan sejarah bangsa, Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelamatan, pelestarian, dan penyediaan akses terhadap arsip tentang sejarah peradaban Islam. Namun demikian, usaha tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara parsial. Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim harus bersatu dalam forum internasional yang dapat mendorong terwujudnya tujuan menyelamatkan sejarah peradaban Islam tersebut.

Peran Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim di Organisasi

Internasional serta Pertemuan Bilateral antara ANRI dan NCAR Saudi Arabia

Hingga saat ini, kehadiran Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia internasional masih dianggap belum memiliki peran yang signifikan, termasuk dalam keanggotaannya di organisasi kearsipan internasional seperti *International Council on Archives* (ICA). Saat ini kepengurusan ICA masih didominasi negara-negara Barat, sehingga mempengaruhi program dan kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini menyebabkan kurangnya program dan kegiatan ICA yang secara khusus terkait dengan negara dan komunitas Islam. Selain itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hingga saat ini juga belum menyelenggarakan kegiatan di bidang kearsipan.

Pada tahun 2022, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan *Director National Center for Archives and Records of the Kingdom of Saudi Arabia* (NCAR) melakukan pertemuan bilateral di Riyadh yang salah satunya adalah membahas perlu adanya peninjauan

dalam rangka pembentukan sebuah forum kerja sama Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip sejarah peradaban Islam.

Pertemuan Pendahuluan Arsip Nasional Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim

Pada tahun 2023, ANRI menyelenggarakan Pertemuan Pendahuluan Arsip Nasional Negara-negara Berpenduduk Mayoritas Muslim yang berlangsung di Jakarta yang diikuti oleh 9 (sembilan) negara, yaitu Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, Qatar, Irak, Maroko, Kuwait, Yordania, dan Palestina. Pertemuan ini didahului dengan seminar pada 12 Juli 2023 tentang Arsip dan Sejarah Peradaban Islam dengan pembicara dari Indonesia, Arab Saudi, dan Malaysia. Seminar ini mendiskusikan tentang peran arsip sebagai sumber sejarah, warisan dokumenter dan memori kolektif bagi bangsa-bangsa negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.



Sidang pembahasan rencana pembentukan forum kerja sama Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di Jakarta, 12 Juli 2023 yang diikuti oleh 9 (sembilan) negara, yaitu Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, Qatar, Irak, Maroko, Kuwait, Yordania, dan Palestina.

Seminar ini dilaksanakan secara luring dan daring dengan peserta lebih dari 1000 orang dari dalam dan luar negeri.

Pada hari yang sama, perwakilan 9 (sembilan) negara yang hadir juga melaksanakan *round table meeting* yang membahas rencana pembentukan forum kerja sama Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Adapun hasil dari diantaranya adalah pernyataan bersama (*Joint Statement*) dari negara-negara peserta yang berisi:

Pertama, menyepakati pentingnya menjalin kerja sama di antara Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang merupakan negara-negara anggota OKI sebagai platform untuk memperkuat kemitraan di bidang kebudayaan dan kolaborasi di bidang kearsipan antar negara anggota;

Kedua, mengucapkan terima kasih kepada ANRI yang menjadi tuan rumah pertemuan pendahuluan ini dan mengadopsi inisiatif Arab Saudi dalam hal ini adalah NCAR untuk membentuk forum kerjasama Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim pada Juni 2022 di Riyadh;

Ketiga, mengoptimalkan peran Arsip Nasional melalui forum kerjasama ini;

Keempat, Melestarikan arsip sejarah peradaban Islam sebagai memori kolektif bangsa dan warisan dokumenter untuk kepentingan masa kini dan generasi masa depan;

Kelima, memberikan akses seluas-luasnya terhadap arsip sejarah peradaban Islam;

Keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arsip sejarah peradaban Islam;

Ketujuh, melaksanakan program kegiatan yang sesuai dengan tujuan serikat kerja sama;

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai hasil dari pertemuan pendahuluan tersebut, NCAR Saudi Arabia selanjutnya akan mengkoordinasikan pembentukan forum Arsip Nasional negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dengan Sekretariat OKI di Jeddah dan akan menyelenggarakan pertemuan lanjutan.

TO BUILD THE WORLD ANEW

Arsip Pidato Presiden Sukarno untuk Dunia di PBB 1961 Sebagai *Memory of The World UNESCO Register*

"Memori Kolektif Bangsa Indonesia untuk Dunia"

Oleh **Rini Rusyeni**

Sukarno dikenal luas sebagai pemimpin yang berwibawa dan tegas, dan seringkali gagasannya mempengaruhi banyak perubahan masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan. Gagasan ideologi Pancasila yang merupakan gagasan besar beliau dalam pidato "*To Build The World Anew*" diciptakan untuk Indonesia dan dunia dimana gagasan ini masih sangat relevan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia modern saat ini. Ketekuaan Indonesia di ASEAN saat ini didasarkan pada asas yang termaktub dalam Pancasila yaitu sikap toleran, keberanian dan menghargai perbedaan telah membuat ASEAN semakin kokoh, bersatu, dan terus menjadi jangkar perdamaian dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara. Saat ini, hanya ASEAN yang menjadi jembatan penghubung untuk mengatasi konflik di Myanmar yang saat ini dikuasai Junta Militer. ASEAN berhasil masuk menjadi penghubung antara Myanmar dengan dunia barat dalam hal penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar yang sampai saat ini masih hidup di tengah-tengah kondisi negara yang tidak stabil akibat perang saudara di internal negara tersebut. Tanpa pengaruh dari ASEAN, Junta Militer sebagai penguasa Myanmar saat ini tidak akan mengizinkan negara manapun untuk memberikan bantuan kepada rakyat Myanmar. "*To Build the World Anew*" sebagaimana yang disampaikan dalam naskah pidato Sukarno di depan sidang PBB benar-benar diimplementasikan secara nyata oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN saat ini.

Gagasan Pancasila yang diahirkan oleh Sukarno merupakan hasil pemikiran terhadap beberapa ide yang berbeda satu sama lain. Sukarno ketika masih muda banyak dipengaruhi oleh ide-ide Tjokroaminoto yang revolusioner dan cenderung melawan aliran tradisi. Selain itu juga, beliau dipengaruhi kegiatan dialog dengan teman-teman kos di rumah Tjokro. Tjokroaminoto sebagai tokoh Sarekat Islam (SI) banyak menggagas gagasan-gagasan tentang sosialisme

dan memadukannya dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Baginya agama Islam dan sosialisme tidak bertentangan karena tujuannya sama yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia yang pada masa itu berada di bawah garis kemiskinan dikarenakan kondisi penjajahan oleh Belanda. Atas dasar inilah Sukarno muda mulai memandang ideologi satu sama lain dapat dipersatukan.

Ideologi agama Islam dan sosialisme menyatu dalam ideologi pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung *Chuo Sang In* (saat ini Gedung Pancasila di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat), Sukarno menyampaikan pidato panjang yang menjelaskan pandangannya tentang 5 prinsip dasar negara Indonesia. Prinsip pertama yakni kebangsaan, kedua internasionalisme (perikemanusiaan), ketiga prinsip mufakat perwakilan rakyat (demokrasi), keempat kesejahteraan, dan kelima prinsip ketuhanan. Kelima prinsip tersebut Sukarno namai dengan sebutan Pancasila yang berarti lima dasar. Pancasila kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga mengilhami Sukarno ketika diundang oleh PBB untuk pertama kali di hadapan peserta Sidang Umum PBB di New York. Dalam pidatonya beliau memperkenalkan Pancasila kepada dunia tepatnya pada tanggal 30 September 1960. Saat itu Presiden Sukarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul *Membangun Dunia Kembali (To Build The World A New)*.

Teks pidato Sukarno di Sidang Umum PBB dibacakan sepanjang 28 halaman. Di dalam pidatonya yang sangat berapi-api penuh semangat, Presiden Sukarno menyinggung Pancasila sebanyak 23 kali. Beliau menyatakan bahwa Pancasila adalah lima sendi negara yang tidak berpangkal kepada gagasan Manifesto Komunis atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang menjadi dasar negara-negara besar barat yang saat itu sedang mendominasi dunia internasional.

Pidato Bung Karno yang berjudul *To Build the World A New* (Membangun Dunia Kembali) yang disampaikan di PBB pada 30 September 1960 merupakan memori dunia yang penting dalam Sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dalam pidato tersebut, Sukarno mencetuskan manifesto intelektual, politik dan ideologi yang bersifat internasional, bahwa dunia harus dibangun kembali. Pembangunan dunia kembali disebabkan oleh bangkitnya kemerdekaan di negara Asia-Afrika, sebagai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ajakan Sukarno untuk membangun

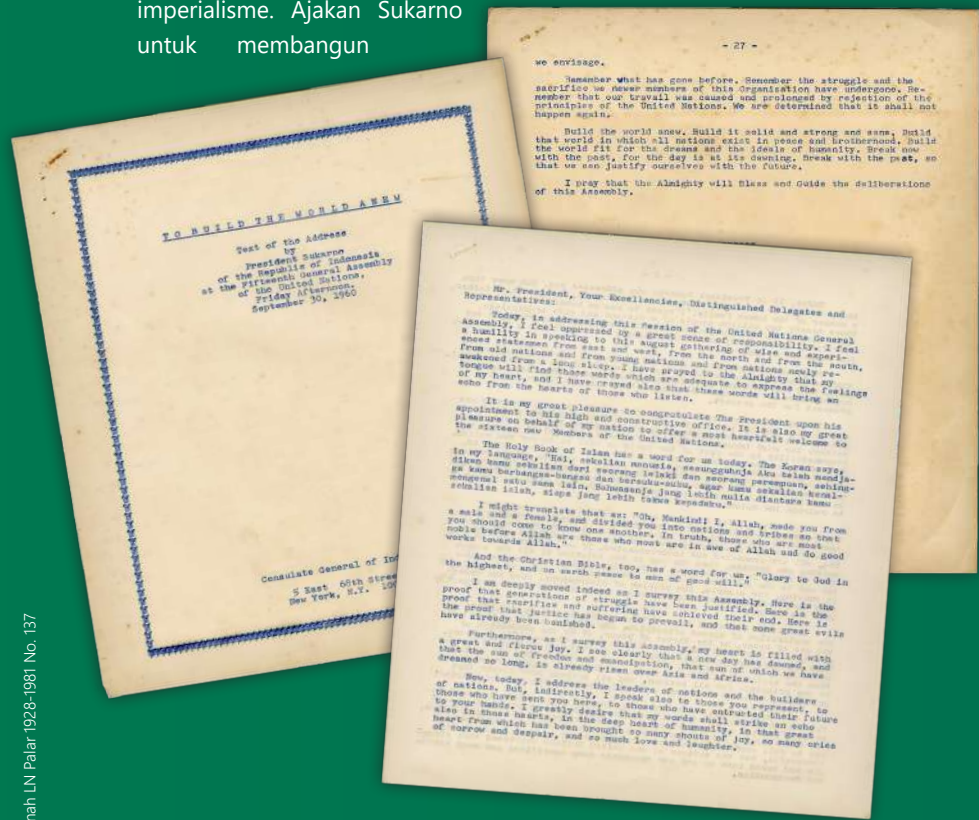
dunia kembali didasarkan pada Pancasila. Di forum dunia yang dihadiri para pemimpin dunia itu, Presiden Sukarno mengenalkan dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi internasional.

Dalam pidatonya, Presiden Sukarno menyampaikan argumentasi kenapa setiap negara perlu mengadopsi Pancasila sebagai ideologi kenegaraannya. Beliau menyatakan bahwa dirinya telah membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat nasional keindonesiaan, tetapi universal dan internasional. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai universal, kemanusiaan universal, nasionalisme universal, demokrasi universal dan keadilan sosial universal. Pada pembahasan mengenai nasionalisme, Presiden Sukarno menjelaskan bahwa nilai nasionalisme dalam Pancasila juga bersifat universal, sebab nasionalisme dalam pancasila dapat dianut oleh semua negara modern yang ada di dunia.

“Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal

dan abadi,” kata Sukarno yang disambut tepuk tangan riuh peserta sidang PBB saat itu. Sungguh sangat mengharukan bagaimana seorang Presiden dari sebuah negara dunia ketiga di Asia yang baru saja merdeka lepas dari penjajahan begitu berani menyampaikan gagasan baru untuk membangun dunia, membangun dunia baru.

Dewan Pakar Indonesia untuk *Memory of The World Unesco* Rieke Diah Pitaloka pada laman media sosial pribadinya menyampaikan bahwa ketetapan arsip pidato Presiden Sukarno, *To Build the World Anew* diputuskan berdasarkan hasil sidang pleno *Executive Board UNESCO* pada 10-24 Mei 2023 bersama dengan khasanah arsip Gerakan Non-Blok Pertama (GNB I) di Beograd, tahun 1961 dan naskah Hikayat Aceh. Nilai-nilai yang terkandung dalam arsip Pidato Presiden Sukarno ini memiliki kontribusi terhadap peradaban dunia bahwa Indonesia sebagai sebuah negara Asia yang baru menghirup udara kemerdekaan telah berani menunjukkan sikapnya dan mengajak negara-negara di dunia untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih baik, dunia yang baru. Keberadaan arsip pidato ini menjadi petunjuk jalan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Mengutip kalimat Ibu Rieke, “arsip penting menjadi ingatan kolektif bangsa dan dunia dan dapat digunakan sebagai petunjuk jalan bagi kehidupan saat ini dan masa yang akan datang.” Dengan arsip, mari kita kenali kembali identitas bangsa Indonesia di masa lalu untuk membangun bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik. Khasanah arsip Mari bersama membangun Indonesia baru, mari bersama berkontribusi untuk membangun dunia yang baru seperti yang dicita-citakan oleh *founding father* kita.. *To Build the World Anew*.



INDONESIA DAN PALESTINA

dalam Catatan Arsip

Oleh **Taufik Nur Huda**

Pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 6.30 Hamas meluncurkan ribuan roket ke arah Israel Selatan dan Utara termasuk di dalamnya Tel Aviv dan Yerusalem. Serangan tersebut kemudian disusul dengan infiltrasi pasukan Hamas menggunakan kendaraan bermotor ke kota dan pemukiman Israel yang terletak di tepi perbatasan Gaza.

Hanya dalam hitungan jam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut peristiwa tersebut sebagai ‘Hari Kegegelapan’ bagi negaranya seraya menyatakan perang terhadap Hamas. Beberapa kalangan veteran perang bahkan menyebutkan bahwa kejadian ini adalah 9/11 bagi Israel. Serangan ini kemudian segera dibalas Israel dengan meluncurkan bom dan roket ke beberapa target sasaran di Gaza. Hingga artikel ini ditulis tidak kurang dari 1.300 penduduk Israel dan lebih dari 2000 warga Gaza meninggal dunia akibat peperangan ini.



Pada 10 Oktober 2023 Presiden Indonesia Joko Widodo mendesak kedua belah pihak Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan agar segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Ia menambahkan agar akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai parameter PBB.

Sesungguhnya bagaimanakah posisi Indonesia dalam konflik palestina Israel jika dilihat dari perjalanan sejarahnya.

Masa Kepresidenan Sukarno

Kurun 1950an menjadi periode yang berat bagi warga Palestina. Masa ini ditandai dengan pengusiran penduduk Palestina pada yang terjadi setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata. Periode eksodus ini juga menandai terlaksananya konsolidasi negara Israel dan meningkatnya ketegangan sepanjang garis gencatan senjata yang pada akhirnya mengarah pada Krisis Suez tahun 1956.

Sukarno sebagai Presiden Indonesia sekaligus tokoh internasional konsisten menggaungkann semangat antipenjajahan dan anti imperialisme. Dalam pidato berjudul ‘Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru’ yang disampaikan pada pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 April tahun 1955 Sukarno menyampaikan ‘Ya, sebagian dari bangsa-bangsa kita belumlah bebas. Itulah sebabnya, maka kita semua belum dapat mengatakan, bahwa tujuan perjalanan kita telah tercapai. Tidak ada rakyat yang merasa dirinya merdeka selama masih ada bagian daripada tanah airnya yang belum bebas. Seperti perdamaian, kemerdekaan pun tidak dapat dibagi-bagi. Tidaklah ada hal yang dapat dinamakan setengah merdeka, seperti juga tidak ada hal yang dapat disebut setengah hidup!. Orang

sering mengatakan kepada kita, bahwa ‘kolonialisme sudah mati’. Janganlah kita mau tertipu atau terninabobokan olehnya! Saya berkata kepada Tuan-tuan, kolonialisme belumlah mati. Bagaimana kita dapat mengatakan ia telah mati selama daerah-daerah yang luas di Asia dan Afrika belum lagi merdeka’.

Arsip pidato ini tersimpan dalam khazanah Roeslan Abdulgani nomor 1806. Konferensi Akbar tersebut juga dihadiri oleh Mufti Palestina Amien el Husaini. Pidato Sukarno tersebut kelak akan menginspirasi para pemimpin negara-negara Asia Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, tidak terkecuali Pemimpin *Palestine Liberation Organisation* Yaseer Arafat.



Mufti Palestina Amin El Husaini sedang diwawancarai para wartawan dalam dan luar negeri sebelum mengikuti siding Konferensi Asia Afrika, 18 April 1955. ANRI Kempen Jawa Barat No. JB 5501/417

Tindakan konkrit Indonesia dalam membantu Palestina telah dilakukan sebelum KAA. Pada Desember 1953 Menteri Luar Negeri Sunario Sastrowardoyo menugaskan Duta Besar Keliling Ahmad Subarjo untuk menghadiri Mukhtar Umum Islam (*General Islamic Congress*) ke

Yerusalem. Usai Muktamari Subarjo mengunjungi beberapa situs di kota tua Yerusalem sekaligus meninjau kamp pengungsi di perbatasan Israel-Palestina. Peristiwa ini tercatat dalam arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Indonesia nomor 2902. Indonesia melalui *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* memberikan bantuan sejumlah 60 ribu dolar Amerika untuk *Palestine Relief Fund*.

Selain daripada itu kami hendak memberitahukan, bahwa kita ^{pengungsi di Palestina} senantiasa menaruh perhatian terhadap soal tersebut, mengingat pula sumbangan kita melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 1951 sebanjak US \$. 30.000.- dan untuk 1952 sedjumlah US \$. 60.000.- dan untuk tahun 1953 diharapkan akan dapat menjumbangkan sebanjak US \$. 60.000.- djuga.

Surat dari Perdana Menteri RI kepada Mufti Palestina tentang sumbangan Indonesia untuk pengungsi Palestina, Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Nomor 2902.

21
Djakarta, 22 Februari 1953.-

Kepada
Mufti Palestina dan
Ketua Panitia Arab Tertinggi
di CAIRO (Mesir)
(melalui Duta R.I. di Mesir)

REPUBLIC INDONESIA
PERDANA MENTERI

No. :
Hal : Sumbangan Indonesia untuk
- pengungsi Palestina.-
Lampiran : satu

Berhubung dengan surat Paduka Tuan tertanggal 31 Desember 1952 hal sumbangan Indonesia untuk pengungsi Palestina dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

Keterangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah memotong kira2 dua pertiga dari djumlah jang masih ketinggalan j.i. Rp. 160.396,23 sebagai pajak berdasarkan kesalahan-fahaman. Uang Rp. 160.396,23 telah dikirim menurut peraturan Devisen jang berlaku di Indonesia, pada tanggal 10 Djanuari 1951 melalui Bank "Factory" kepada Barclays Bank, Cairo atas nama Duta R.I., pada waktu itu Hadji M. Rasjidi.

Menurut peraturan devisen jang berlaku di Indonesia uang Rp. 160.396,23 adalah sama dengan ££ 5000.- (limaribu pound Mesir), artinja tidak diadakan potongan sebagai pajak.

Penerimaan uang itu telah dinjatakan oleh Duta M. Rasjidi dalam surat beliau kepada kami tertanggal 31 Djanuari 1951 No. 1623/Q, sub.j.: Pertolongan Indonesia kepada pengungsi Palestina jang salinannja bersama ini dilampirkan.

Pembagian uang berdjumlah ££ 5000.- (limaribu pound Mesir) itu diselenggarakan oleh Duta R.I. pada waktu itu Hadji M. Rasjidi, dengan mengingat faktor2 jang ada di Mesir.

Hendaknja Paduka Tuan mendjadi maklum adanja.

(Mocharta Horowidigda)
(MR. WILGPO)

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan: P. M.
1. Menteri Agama
2. Menteri Luar Negeri
3. Direktur Kabinet Presiden.

Solidaritas terhadap Palestina terus berlanjut meskipun membawa resiko sanksi internasional kepada Indonesia. Pada tahun 1962 ketika menjadi tuan rumah *Asian Games IV* Indonesia tidak memberikan visa kepada kontingen Israel dan Taiwan. Penolakan ini kemudian menuai reaksi, Komite Olahraga Internasional menskors keanggotaan Indonesia tanpa batas waktu. Presiden Sukarno justru menggunakan sanksi tersebut sebagai momentum untuk melawan. Sukarno kemudian memerintahkan menarik keluar keanggotaan Indonesia dan segera menyelenggarakan olimpiade tandingan bernama *Games Of New Emerging Forces (GANEF)* pada tahun yang sama.

Masa Kepresidenan Soeharto

Dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Komunikasi diplomatik Indonesia-Palestina terekam dalam khazanah arsip Sekretariat Negara Surat Presiden Soeharto. Pada 27 Agustus 1977 Yasser Arafat dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Eksekutif PLO/Panglima Tertinggi Revolusi Palestina bersurat untuk memohon dukungan dan pengokohan pendirian Negara Palestina Merdeka. Surat tersebut kemudian dibalas Presiden Soeharto yang menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan Palestina melawan Israel.

الرئيس

الرئيس

سيادة الاخ الرئيس سوهارتو

تحية الثورة وحد

تجارت القضية الفلسطينية في هذه الايام مرحلة هامة وخطيرة حيث تتنازع
المحاولات لتصفيتها وتناول على شعبها الصامد وامرات الصهيونية الهادفة الى نائه
وانها قضيتة وهذا ما دفعني لكتابة لسيادتك شخصيا في تفتية عاجلة تصمير شعبنا
المواجد على ارض لبنان الشقيق .

وفي اعتقادي انكم قد تابعتم ما جرى من احداث في السنتين العاشرتين ، تلك الاحداث
التي حاولنا باخلاص تقاد بها لولا اخطارنا لاستعمال حق الدفاع عن النفس في وجه اصرار القوى
الانعزالية على مواصلة المعارك وتصعيد ها تحت اسباب واهية نتججه لوقوف تلك القوى في مسرك
الموازية الاسرائيلية .

وبذلك وبالرغم ما تعرضنا له ظلما وبهتاننا ، فاننا نتابع بذل الجهود المخلصة والهادفة
لتطبيق ما تم عليه الاتفاق مع سيادة الرئيس الياس سركيس وخاصة فيما يتعلق باعادة بنا مخيي تسل
الزعتروجسر الباشا لابنائنا النازحين منهما وهذا ما دفعني للكتابة لكم حول هذه المشكلة التي تحتاج
الى دعمك ومساندتكم في اعادة بنا المخيمين المذكورين والتخفيف من الماسي التي اضابت بنا شعبنا
المشردين .. وانني احمد الله ان مؤتمري الرياض والقاهرة قد وضعوا حدا لهذه الماساة التي خلفت
العديد من المشاكل امامي احداها والجمها مشكلة تل الزعتروجسر الباشا .

لقد استطاع شعبنا الصامد ان يحقق العديد من المكاسب السياسية في الاطرين القوي
والدولي رغم جميع المحاولات الاسرائيلية الهادفة الى اثنائه وانها قضيتة . وكما تعلمون سيادتك
فقد تم واخواني قيادة المنظمة باجرا المزيد من الاتصالات العربية والدولية بهدف
تكمين شعبنا من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها

حقه في اقامة دولته المستقلة في فلسطين ومن اجل ذلك ، فاننا نرفع
نصب اميننا ضرورة تحقيق المزيد من الاعتراف بهذه الحقوق ومنظمة التحرير الفلسطينية
كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني المناهض .

اخي الرئيس ...

انني اتطلع واخواني الى مساندة تكم ودعمكم لابنا شعبنا الصامد ولا يغوتسي
في هذه المناسبة ان انوه بالمواقف الاخوية الصادقة والدم المتواصل الذي قد مننتمسه
وشعبكم الشقيق لقضيتنا العادلة والجهود المخلصة التي تبذلونها في
سبيل احلامنا شان التضامن الاسلامي .

وخشاما فانني ارجو لسيادتك دوام الصحة والتوفيق وللشعب الاندونييسي الشقيق
دوام التقدم والازدهار .

والله يحفظكم ويحافظكم

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القائد العام للثورة الفلسطينية

سيادة الاخ الرئيس سوهارتو

رئيس جمهورية اندونيسيا / جاكرتا

Surat dari Ketua PLO Yasser Arafat kepada Presiden Soeharto yang berisi permohonan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, 27 Agustus 1977. ANRI Sekretariat Negara Surat Presiden Soeharto Nomor 869.

KHAZANAH

Tidak kurang dari 19 nomor arsip surat diplomatik menjadi bukti betapa eratnya hubungan Arafat dan Presiden Soeharto. Dalam surat-suratnya Arafat mewakili Palestina meminta kepada Indonesia untuk membantu menyuarakan dukungan pada perjuangan Palestina dalam forum-forum internasional seperti pada KTT Non Blok 1983 di New Delhi India, Sidang Darurat Menlu Negara Organisasi Konferensi Islam, KTT Gerakan Non Blok di Jakarta 1992.

Adapun surat terakhir dikirimkan Presiden Soeharto pada 6 Juni 1997 yang berisi ucapan Selamat Tahun Baru Hijriah dan penegasan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Rakyat Palestina secara konsekuen untuk kembali memperoleh hak-hak sahnya menentukan nasib sendiri serta mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Al-Quds sebagai ibukotanya



Presiden Soeharto dan Pimpinan Negara Lain, seperti Yaser Arafat saat tiba untuk mengikuti KTT Nonblok yang diselenggarakan di Gedung Merdeka Bandung September 1992.

Arsip Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Selain korespondensi, kedua pemimpin juga bertatap muka secara langsung. Pada 1984 Arafat berkunjung ke Jakarta dan diterima oleh Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Kunjungan berikutnya adalah pada September 1992 ketika

mengikuti KTT Non Blok dimana Indonesia menjadi tuan rumah. Pada September 1993 kedua pemimpin kembali bertemu di Jakarta pasca Arafat menandatangani perjanjian Oslo dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin.

Secara resmi hubungan diplomatik Palestina Indonesia dibuka pada 19 Oktober 1989 setelah ditandatanganinya Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik Antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dengan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi. Hal ini menjadi bukti sebagai dukungan nyata Indonesia pasca Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 15 November 1988 di Aljazair. Dua Tahun kemudian Indonesia menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990. Sebaliknya, Pemerintah RI menetapkan bahwa Duta Besar RI di Tunis juga diakreditasikan bagi Negara Palestina. Sejak 1 Juni 2004, akreditasi Palestina berada di bawah rangkapan KBRI Yordania



Presiden RI. K.H. Abdurrahman Wahid didampingi Menteri Luar Negeri Alwi Shihab berbincah dan berjabat tangan dengan Presiden Palestina Yasser Arafat pada acara Konferensi *Millenium Summit*, New York 4-11 September 2000. ANRI Foto K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 5970

resmi dengan Israel selama mereka masih belum mengembalikan hak-hak Bangsa Palestina yang dirampas secara paksa.

Era Reformasi

Sejalan dengan pendahulunya Presiden Habibie (1998-1999) menekankan dukungannya terhadap kebebasan Palestina. Habibie melanjutkan peran aktif Indonesia dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk memperjuangkan hak-hak Palestina dan penyelesaian konflik di Kawasan Timur Tengah.

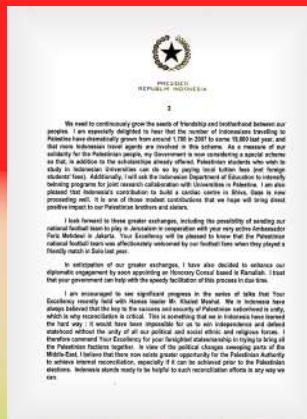
Perkembangan yang menarik terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid yang pada beberapa kesempatan mewacanakan untuk membuka hubungan dengan Israel meskipun hanya terbatas pada sektor ekonomi dan perdagangan. Gus Dur menyampaikan bahwa Indonesia tidak punya alasan untuk bermusuhan dengan Israel seraya menyampaikan fakta bahwa hubungan dagang telah terjalin sejak lama dengan China dan Sovyet dimana dua negara tersebut menuangkan prinsip atheism dalam konstitusinya. Gus Dur kemudian menjelaskan bahwa Israel adalah negara yang memiliki reputasi dalam menghargai Tuhan dan agama-agama. Pendapat ini kemudian menuai pro kontra di masyarakat dan ide tersebut pada akhirnya tidak terwujud hingga akhir masa pemerintahannya. Dalam hal diplomatik sikap Gus Dur sejalan dengan Presiden RI sebelumnya tidak akan pernah membuka hubungan

Era pemerintahan selanjutnya yaitu Presiden Megawati tetap melanjutkan hubungan diplomatik yang telah terjalin sebelumnya. Pada Oktober 2001 ia melakukan penyegaran dengan mengangkat Musma Musa Abbas, S.H. sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Palestina berkedudukan di Tunis, Tunisia.

Masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono ditandai dengan semakin intensifnya hubungan diplomatik Indonesia – Palestina. Pada Oktober 2007 Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan delegasi melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia. Pada kesempatan ini kedua belah pihak menandatangani beberapa nota kesepahaman antara lain: Kesepakatan untuk mengadakan



Letter of *credential* a.n. Musma Musa Abbas, S.H. Duta Besar LBPP RI untuk Palestina merangkap Jamahiriyyah Arab Libya Sosialis Raya, dan Tunisia dan letter of recall a.n. Is Isnadi, 2001. ANRI Sekretariat Negara Surat Presiden Megawati Nomor 142.



Surat dari Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI kepada Mahmoud Abbas, Preseden Palestina sehubungan dengan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan keanggotaan di PBB sebagai negara independen dan berdaulat, 2012. ANRI Sekretariat Negara Surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 1526.

konsultasi reguler antar kedua negara untuk membahas urusan diplomatik dan lainnya (pendidikan, ekonomi, kebudayaan); peningkatan Kerjasama antar kementerian luar negeri melalui pelatihan untuk diplomat Palestina, pertukaran dosen, mahasiswa, serta material-material publikasi diplomatic. Kemudian turut ditandatangani pula Kerjasama *Sister Capital City* antara Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Al-Quds Al Shareef. Naskah MoU ini disimpan di Treaty Room Kementerian Luar Negeri RI dan dapat diakses secara digital melalui <https://treaty.kemlu.go.id/search>. Presiden Mahmoud Abbas kemudian melakukan kunjungan kembali ke Indonesia pada Mei 2010 dan Februari 2014.

Support terhadap Palestina juga tercermin dalam surat diplomatik Presiden SBY. Dalam surat tertanggal 27 Februari 2012 tersebut Presiden SBY menyampaikan bahwa ia telah memerintahkan perwakilan Indonesia di PBB untuk selalu mendukung dan memperjuangkan Palestina menjadi anggota penuh di organisasi tersebut. Dalam forum regional Indonesia juga telah mengajak anggota ASEAN untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina dan hampir semua negara tersebut merealisasikannya. Hal lain yang disampaikan adalah apresiasi atas meningkatnya wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Palestina dan mahasiswa Palestina yang menempuh pendidikan di Indonesia, kontribusi dalam Pembangunan rumah sakit kardiologi di Shiva, Gaza, serta kemungkinan diadakannya pertandingan sepakbola persahabatan antar dua negara. Untuk menunjang hubungan yang semakin erat SBY kemudian berencana untuk membuka Konsul di Ramallah Tepi Barat. Hal paling penting yang disampaikan adalah pentingnya rekonsiliasi antara pemerintah Palestina dan faksi seperti Hamas. Tanpa persatuan antara para politisi, grup etnik, dan pasukan berbasis agama maka kemerdekaan Palestina yang dicita-citakan mustahil tercapai.

Keinginan Presiden SBY untuk membuka konsulat di Palestina

kemudian diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo. Konsul Kehormatan yang terletak di Ramallah diresmikan pada 13 Maret 2016. Seyogyanya konsulat ini akan diresmikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Ramallah. Namun karena mendapat larangan masuk dari Pemerintah Israel maka peresmian konsulat kehormatan ini akhirnya dilakukan di KBRI di Amman, Yordania.

Beberapa hari sebelumnya Indonesia telah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) pada 6-7 Maret 2016 di Jakarta guna membahas dukungan terhadap Palestina yang dituangkan dalam Resolusi dan Deklarasi Jakarta. Draft Resolusi berisi tentang upaya menegaskan kembali posisi, prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan. Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina. Sementara Deklarasi Jakarta berisi tentang inisiatif Indonesia yang memuat rencana aksi konkret para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Pada sisi lain walaupun tidak ada hubungan diplomatik resmi Indonesia Israel namun relasi dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pariwisata terus berjalan. Mengutip laman the conservation tercatat 30.000 turis asal Indonesia mengunjungi Israel setiap tahunnya dimana Sebagian besar adalah wisatawan religi. Sebaliknya sekitar 500 orang warga Israel mengunjungi Indonesia tiap tahun baik untuk berwisata atau menjalin kontak bisnis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, total nilai ekspor Indonesia ke Israel pada 2022 mencapai US\$ 185 juta (sekitar Rp. 2,9 triliun). Ekspor utama Indonesia adalah Crude Palm Oil. Sementara Indonesia mengimpor berbagai produk Israel terutama peralatan mekanik dan mesin, serta senjata senilai US\$ 43 juta (Rp.750 miliar) pada tahun yang sama. Angka-angka tersebut masih jauh lebih tinggi dari neraca perdagangan Indonesia – Palestina pada tahun yang sama yaitu US\$ 823 ribu untuk ekspor dan US\$ 1,2 juta untuk impor.

Two States Solution dan Kehendak Perdamaian

Menanggapi konflik Hamas-Israel seperti yang tercantum di awal tulisan ini, posisi pemerintah Indonesia selalu menganjurkan untuk kembali keputusan PBB yang telah disepakati. Dalam KTT ASEAN GCC pada di Riyadh pada 20 Oktober 2023 Presiden Joko Widodo menyerukan agar tindak kekerasan di Gaza dihentikan di Tengah konflik antara Palestina Hamas dan Israel. Presiden menyampaikan bahwa kita tidak boleh lupa bahwa akar masalahnya adalah pendudukan Palestina oleh Israel dan harus diselesaikan dengan parameter internasional yang telah disepakati. Sikap ini telah pula disampaikan sejak 2018 tepatnya pada KTT ke-6 ASEAN-AS di *Suntec Convention Centre*, Singapura. Dalam kesempatan tersebut presiden menegaskan untuk mencapai perdamaian yang berkeadilan dan abadi hanya ada satu jalan, yaitu perdamaian berdasarkan *two state solution*.

Two State Solution atau Solusi Dua Negara merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 yang diadopsi secara bulat pada 22 November 1967. Inti dari resolusi tersebut adalah penarikan pasukan Israel dari wilayah yang didudukinya pasca Perang Enam Hari 5-10 Juni 1967 serta Pengakhiran semua klaim atau keadaan berperang dan penghormatan serta pengakuan terhadap kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik setiap Negara di wilayah tersebut dan hak mereka untuk hidup damai dalam batas-batas yang aman dan diakui. Resolusi 242 ini menjadi putusan konflik Arab-Israel yang paling banyak disetujui dan menjadi rujukan dalam perjanjian-perjanjian selanjutnya.

Prospek Perdamaian Palestina dan Israel nampaknya masih akan menempuh jalan yang berliku. Besar kecilnya peran Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sebagai katalisator perdamaian konflik ini akan tergantung pada kebijakan pemimpin kita selanjutnya. Menutup tulisan ini ada baiknya kita renungkan kembali kata-kata Bung Karno yang disampaikan Sidang Umum PBB pada 30 September 1960 "Lenyapkanlah sebab-sebab peperangan, dan kita akan merasa damai. Lenyapkanlah sebab-sebab ketegangan dan kita akan merasa tenang. Jangan ditunda-tunda. Waktunya singkat. Bahayanya besar"

ANDI MAKMUR MAKKA

Aktivistis, Jurnalis, dan Penulis
yang berjiwa Arsiparis

Oleh **Afrizal Zurman**



Tak banyak orang tahu, pria berperawakan kurus asal Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu penulis buku yang produktif di Indonesia, khususnya buku-buku biografi mengenai profil Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie (B.J Habibie). Hal ini dikarenakan ia sempat menjadi salah satu orang kepercayaan dari Habibie sehingga dipercaya untuk mengurus segala sesuatu masalah administrasi khususnya persuratan terutama yang diterima oleh B.J. Habibie. Tak heran, beberapa koleksi arsip B.J Habibie yang diterima dan disimpan oleh Arsip Nasional RI saat ini, berasal dari hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan banyak rekam jejak aktivitas B.J Habibie selama menjalani jabatan penting di pemerintahan.

Adalah Andi Makmur Makka atau sering disapa Makmur Makka seorang penulis, puisi, naskah drama, cerita pendek serta jurnalis yang telah menghasilkan banyak karya sastra sepanjang karirnya. Makka merupakan pria asli asal Parepare, Sulawesi Selatan, kampung halaman yang sama dengan tempat kelahiran B.J Habibie. Lahir pada 13 Februari 1945 di Parepare, masa kecil Makka dihabiskan di kota Parepare mulai dari Sekolah Rakyat hingga menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)-nya. Usai lulus dari SMA, Makka muda memutuskan untuk pindah merantau ke Yogyakarta untuk menempuh jenjang pendidikan sarjana pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada (UGM).

Aktivistis Muda Kampus

Sejak mahasiswa, Makka merupakan sosok yang sangat aktif berorganisasi di kampus. Ia pernah bergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan, antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Selama menjadi mahasiswa, Makka memiliki minat yang tinggi di bidang jurnalistik.

Tercatat, Makka pernah menjadi Ketua Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) Cab.

Yogyakarta, pemimpin redaksi Majalah Mahasiswa UGM GEMA bersama M.

Dawan Rahardjo (salah satu tokoh pemikir pembaruan Islam Indonesia), Koresponden Mingguan Mahasiswa Indonesia Bandung pimpinan Rahman Tolleng, serta instruktur Pendidikan Nasional Pers Mahasiswa (IPMI). Tak

hanya itu, Makka juga menunjukkan bakatnya dalam bidang menulis. Berbagai tulisan pernah ia buat selama menjadi mahasiswa, beberapa diantaranya ialah esai dan juga kumpulan puisi yang ia tulis bersama sahabatnya, Darmanto Jatman, seorang budayawan, filosof, dan penyair kenamaan Indonesia.

Usai lama menetap di Yogyakarta, Makka pun memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Di Jakarta, ia memilih untuk mengekspresikan bakat menulisnya dengan bekerja di Harian KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) sebagai anggota redaksi. Selain itu, ia juga pernah menjadi redaktur pelaksana buletin Tribun, redaktur pelaksana Majalah Mimbar Demokrasi yang dipimpin oleh Nurcholish Madjid, Adi Sasono, Sugeng Saryadi, dan Fahmi Idris. Untuk mempertajam kemampuan jurnalistiknya, atas undangan *The Asia Foundation*, Makka pernah pula mewakili IPMI untuk mengikuti Sub-editor Workshop selama 3 minggu di Kuala Lumpur.



Rapat Republika yang dihadiri oleh Adi Sasono, B.J. Habibie, Parni Hadi, dan Makmur Makka (Inventaris Arsip Makmur Makka 1965-2009, No. 180)

Menjadi Abdi Negara

Kedekatan Makka dengan B.J Habibie dimulai saat ia memulai karir menjadi asisten Prof. Dr. B.J Habibie, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPPT pada 1978. Selama menjadi PNS, Makka pernah menjabat beberapa jabatan penting di Kemenristek/BPPT, antara lain sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPPT dan staf ahli Menristek/Ketua BPPT bidang informasi (1997-2000). Teman seangkatannya di lingkungan Kemenristek/BPPT antara lain adalah Letjen TNI. Sintong Panjaitan (staf bidang pertahanan), Dr. Ridwan (bidang Nuklir) dan Prof. Dr. Sudraji (bidang kedokteran), dan Dr. Sutjipto Wirosarjono. Pada medio 1990-an, Makka pun mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi pasca sarjananya di luar negeri, yakni di Ohio University, Amerika Serikat. Makka mengambil jurusan Hubungan Internasional (International Affairs). Beberapa kursus pemerintahan pun pernah ia ikuti, antara lain Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional (Sespanas), Diklat Penataran P4 Angkatan Pertama dan Penataran P4 Manggala di Istana Bogor. Namun, Makka memutuskan untuk berhenti dari karirnya sebagai PNS pada tahun 2000 setelah mengabdikan hampir 22 tahun di lingkungan BPPT dengan jabatan terakhir sebagai staf ahli Menristek/Ketua BPPT bidang informasi, yang pada saat itu Menristek masih dijabat oleh Dr. Muhammad A. S. Hikam.

Kepiawaian Makka dalam berorganisasi dilanjutkan dengan mendirikan beberapa organisasi besar

di Indonesia. Bersama rekan-rekannya, diantaranya Erik Salman, Immaduddin Abdurrahim dan M. Dawam Rahardjo, Makka menginisiasi berdirinya organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sebuah organisasi yang merupakan wadah berkumpulnya para cendekiawan muslim se-Indonesia untuk berkontribusi dalam memperbaiki kondisi Indonesia. Dalam kepengurusan awal ICMI, Prof. Dr. Ing. B.J Habibie selaku Menristek/Kepala BPPT didaulat sebagai ketua umum yang pertama hingga tahun 2000. Selain ICMI, Makka juga turut mendirikan CIDES (*Center for Information and Development Studies*) sebagai lembaga think thank ICMI untuk berkiprah dalam bidang riset dan penelitian untuk kepentingan pembangunan Indonesia. Di CIDES, Makka sempat menjabat sebagai Direktur CIDES bersama Adi Sasono (mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan) dan Ahmad Watik Pratiknya.

Pada 1993, ICMI bersepakat untuk melebarkan kiprahnya di bidang jurnalistik dengan mendirikan Harian Umum Republika sebagai harian yang bernafaskan Islam yang moderat. Koran ini didirikan dengan tujuan sebagai corong informasi bagi kepentingan umat Islam pada saat itu. Di bawah bendera PT. Abdi Bangsa, Republika akhirnya mendapatkan izin dari pemerintah untuk beroperasi, di tengah pengetatan izin penerbitan dari pemerintah. Tepat pada 4 Januari 1993, Republika mulai terbit edisi pertama dimana saat itu Parni Hadi ditunjuk sebagai pimpinan redaksi pertama Republika.

Pada 1997, Ketua Umum ICMI, B.J Habibie meminta Makka untuk memimpin Harian Umum Republika menggantikan Parni Hadi. Makka pun memimpin H.U Republika dibantu oleh Amin Rais, M. Dawam Rahardjo, Sutjipto Wirosarjono, dan Adi Sasono sebagai anggota dewan redaksi. Namun, Makka tak lama memimpin Republika. Tepat pada bulan September 2000, ia mengundurkan diri sebagai pemimpin redaksi. Posisinya saat itu digantikan oleh Zaim Uchrowi. Selain itu, saham Republika yang saat itu mayoritas dimiliki oleh PT. Abdi Bangsa, kemudian beralih kepada kelompok Mahaka Media yakni PT. Republika Media Mandiri hingga saat ini.

Saat ini, Makka masih aktif selain sebagai editor dari artikel, kolom, maupun tajuk beberapa surat kabar, ia juga diamanahi sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Dompot Dhuafa Republika, serta sebagai anggota Dewan Pembina di *Habibie Center*, sebuah organisasi non-profit yang didirikan oleh B.J Habibie dengan tujuan untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama. Bersama putra sulung B.J Habibie, Ilham Habibie sebagai ketua Dewan Pembina, Makka lebih banyak menjalankan aktivitas hariannya di yayasan tersebut. Selama hidupnya, Makka telah menerima banyak penghargaan, beberapa diantaranya ialah bintang pratama dan bintang jasa utama dari Presiden RI atas kontribusi yang luar biasa bagi negara dan bangsa. Ia juga termasuk ke dalam 100 tokoh warga Sulawesi Selatan yang berpengaruh di Indonesia, serta pernah pula menjadi alumni berprestasi Universitas Gajah Mada (UGM).



Menristek/Kepala BPPT Prof. Dr-Ing B.J. Habibie memberikan selamat kepada Makmur Makka usai penempatan Bintang Jasa Pratama dari pemerintah RI (Inventaris Arsip Makmur Makka 1965-2009, No. 18)

Sang Penulis Biografi Habibie

Selain menjalani karir sebagai jurnalis, Makmur Makka juga merupakan seorang penulis buku yang sangat produktif. Ia banyak menulis buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Beberapa buku fiksi yang ia tulis antara lain berjudul "Ungu" (kumpulan puisi yang ditulis bersama Darmanto Jatman), "Manifes" (kumpulan puisi bersama penyair Jogja), "Tanah Air" (kumpulan puisi), "Buah Cherry Ladang Gandum" (kumpulan cerpen), "Ibu" (prosa liris), "Rumpa'na Bone" (novel sejarah, penerbit Kompas), "Sajak-Sajak Maliboro" (kumpulan puisi), serta "Secawan Matahari" (kumpulan Puisi). Sejumlah karya sastranya juga saat ini tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Taman Ismail Mazuki, serta Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Sedangkan, untuk karya-karya non-fiksinya antara lain ialah "Anak Inlander di Negeri Belanda" (kumpulan esai), "Pakaian Kebesaran" (kumpulan esai), "Sirkus-Sirkus Demokrasi", "Britney Spear di Beranda Kita", serta beberapa buku biografi Prof. B.J Habibie seperti misalnya "Kisah Satu Menit BJ Habibie", "BJ Habibie Mr. Crack dari Parepare". dan "Saya" Untold Story BJ Habibie. Khusus untuk buku-buku biografi mengenai B.J. Habibie, Makka merupakan satu-satunya penulis buku tentang B.J Habibie yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) tahun 2018 sebagai pemegang rekor penulis buku biografi tentang B.J Habibie terbanyak di Indonesia dengan 95 judul buku. Hal ini menjadikan Makka sebagai penulis biografi Habibie yang paling banyak tahu dan mengenal sangat dalam mengenai sosok Presiden ke-3 RI, B.J Habibie.

Sejarah perjalanan karir Makmur Makka saat ini telah terekam dalam arsip Makmur Makka yang telah tersimpan di Arsip Nasional RI. Arsip tersebut diserahkan pada Desember 2021 lalu, bersamaan dengan penyerahan arsip B.J Habibie yang diserahkan secara langsung oleh Makmur Makka kepada Kepala Arsip Nasional RI. Arsip tersebut merupakan arsip yang dikumpulkan Makka selama menjalani karirnya. Ia mengaku sangat gemar untuk mengumpulkan berbagai macam tulisan, laporan, surat-surat, dan foto-foto masa lalu untuk disimpan sebagai catatan sejarah, termasuk beberapa diantaranya dokumen pribadi milik Presiden ke-3 B.J Habibie. Arsip yang diserahkan Makka antara lain arsip mengenai perjalanan karirnya mulai dari saat menjadi mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ristek/BPPT, pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Direktur CIDES (*Center for Information and Development Studies*), pengurus Yayasan Abdi Bangsa, Pemimpin Redaksi *Republika* dan *Tabloid Tekad*, hingga beberapa koleksi surat-surat pribadi korespondensi bersama kolega. Di dalamnya juga terdapat arsip mengenai dokumen awal pendirian *Harian Umum Republika* seperti notulen rapat, Surat Keputusan, serta laporan-laporan. Arsip tersebut kini dapat diakses melalui Inventaris Arsip Makmur Makka 1965-2009 yang tersedia di ruang layanan arsip maupun website ANRI, dimana inventaris ini memuat 399 nomor arsip, yang terdiri dari 384 nomor arsip tekstual dan 15 lembar arsip foto.



Makmur Makka
(sumber: <https://badaruddinamir.wordpress.com/2010/12/02/a-makmur-makka/>)

ANWAR ASYRAF

PRESERVASI DIGITAL DAN PENERAPANNYA DENGAN APLIKASI DROID

Halo Sobat Arsip! Di rubrik preservasi kali ini, kita akan membahas tentang preservasi arsip digital beserta teknologi terkini yang digunakan. Menurut Asosiasi Perpustakaan Amerika Serikat, preservasi digital adalah suatu bidang yang memkombinasikan kebijakan, strategi, dan tindakan untuk menjamin proses transfer yang tepat pada konten autentik, walaupun terdapat tantangan perubahan teknologi dan keobsolotan medium. Preservasi digital saat ini merupakan kegiatan yang penting sekali untuk dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara untuk menjamin ketersediaan akses arsip untuk jangka waktu yang lama, baik yang diciptakan secara digital maupun yang sudah mengalami perubahan format. Format file adalah suatu hal yang perlu untuk diketahui untuk menentukan medium apa yang dapat digunakan untuk membuka file tersebut dan tindakan yang tepat untuk mengelolanya.

Arsip Nasional Inggris Raya mengembangkan suatu aplikasi bernama DROID (Digital Record Object Identification) untuk membantu perseorangan dan lembaga dalam proses identifikasi format file secara otomatis dengan jumlah yang besar. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita akan dapat mengetahui versi aplikasi, usia file, ukuran dan kapan

file tersebut dimodifikasi. Aplikasi ini juga menyediakan informasi untuk membantu kita dalam mengidentifikasi format file yang ekstensinya *missing* atau *wrong*.

Bagi Sobat Arsip yang tertarik, aplikasi ini tersedia di internet untuk diunduh secara gratis karena sifatnya *open source*. Di dalam kesempatan ini, penulis akan menjelaskan tentang cara mengunduh dan menggunakan aplikasi ini.

Aplikasi DROID dapat diunduh melalui link¹ berikut dalam bentuk zip. Ada dua opsi download aplikasi DROID. Pertama aplikasi DROID untuk Windows yang sudah terdapat Java di dalamnya dan aplikasi DROID untuk sistem operasi apapun dengan Java 8 sampai 10 atau OpenJDK. Untuk menginstal aplikasi DROID, lakukan proses unzip pada file yang diunduh pada folder yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk menjalankan aplikasi pada komputer yang menggunakan Windows dapat mengeklik dua kali pada file `droid.bat`. Beda halnya dengan komputer dengan sistem operasi Apple/Linux yang mengharuskan kita untuk mengeklik dua kali pada file `droid.sh`.

Di dalam aplikasi DROID ada menu help yang berbentuk dialog untuk mengetahui versi aplikasi DROID yang kita unduh, versi Java dan lokasi kita menyimpan file aplikasi dan folder log. Terdapat tombol kopi untuk menyalin informasi tersebut di dalam kolom dialog, sehingga ketika kita memerlukan bantuan dan memiliki pertanyaan seputar aplikasi, pengembang aplikasi dapat mengetahui versi aplikasi DROID dan Java yang kita pakai.

Ketika aplikasi DROID terbuka, maka ia akan secara otomatis membuat profil (sebuah tab kosong bertuliskan Untitled-1). Pastikan aplikasi DROID sudah dalam keadaan siap sebelum digunakan.

Setelah itu, kita dapat memilih file digital mana yang ingin kita identifikasi dengan melakukan *drag* file ke profil aplikasi DROID atau dengan mengeklik tombol + atau klik edit -> add files/folders. Di bagian kiri terdapat kolom navigator, yang memudahkan kita untuk mengeksplor file sistem. Contoh gambar di bawah ini menunjukkan pada folder "file explorer" yang dipilih berada di sebelah kiri dengan isi folder tersebut di sebelah kanan. Di dalam folder tersebut ada beberapa subfolder yang tercentang secara default. Kita dapat menghilangkan centang tersebut dengan mengekliknya, jika kita hanya ingin memilih folder tanpa subfoldernya.

Ketika kita sudah memasukkan seluruh file yang ingin kita identifikasi, kita dapat menekan tombol start. *Progress Bar* akan muncul selama proses identifikasi berlangsung, sehingga kita bisa mengetahui bahwa aplikasi bekerja. Jika proses ini memperlambat kerja aplikasi lainnya, kita dapat mengurangi kecepatan aplikasi ini mengidentifikasi dengan mengatur kecepatan melalui *Throttle Bar* yang berada di pojok kanan bawah. Jika *Throttle Bar* ini diatur secara *default*, maka aplikasi ini akan melakukan proses identifikasi tercepat. Proses identifikasi dapat diberhentikan selama berlangsung.

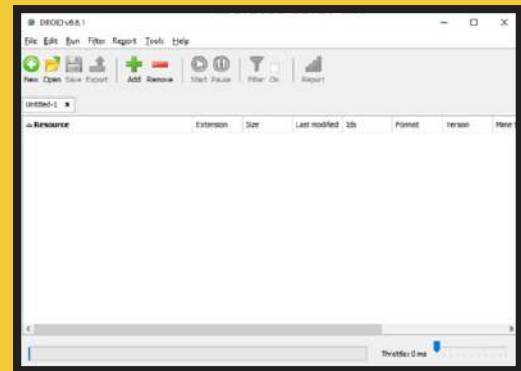
Profil yang berisi file hasil identifikasi bisa diunduh dengan format 'droid file'² yang akan memungkinkan identifikasi kapanpun cara paling umum identifikasi adalah ke format CSV dan membuka file tersebut. menekan tombol *export profiles*.



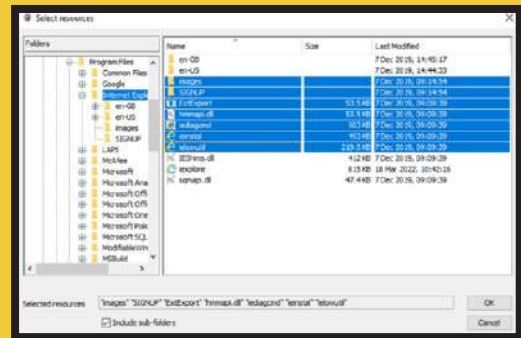
Gambar 1. Profil awal aplikasi DROID

Nama profile berada di kolom sebelah kiri dan jika tidak ada profil yang dibuat, maka kolom akan kosong. Di sebelah kanan ada beberapa komponen yang dapat kita pilih ketika melakukan *export* yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jika kita tidak ingin ada informasi tentang *file hash* di hasil *export*, maka kita dapat menghilangkan centang dengan mengeklik satu kali pada kolom *file hash*. Jika kita ingin menambahkan *quote* agar *software* lain dapat mengelola file dengan benar, maka kita dapat mengeklik satu kali pada *quote all export columns*. Selain itu, kita juga dapat memilih salah satu dari metode *export*, *one row per file* atau *one row per format identification*. Jika kita memilih *one row per file*, setiap baris pada file CSV (Comma Separated Value) akan menampilkan satu file, folder atau file arsip yang telah diidentifikasi oleh DROID. *One row per format identification* dipilih ketika kita ingin hasil *export*-nya (dalam bentuk CSV) menampilkan baris yang berisi satu identifikasi format data. Setiap file yang diidentifikasi oleh DROID dapat berupa beberapa format tertentu, sehingga dengan memilih metode ini kita akan melihat banyak baris keterangan format file pada satu file yang sama. Setelah itu, kita dapat mengeklik tombol *export profiles* yang berada di sebelah kanan bawah untuk menyimpan profil yang sudah diatur sebelumnya. Kita dapat memilih format file CSV dan klik *save*.

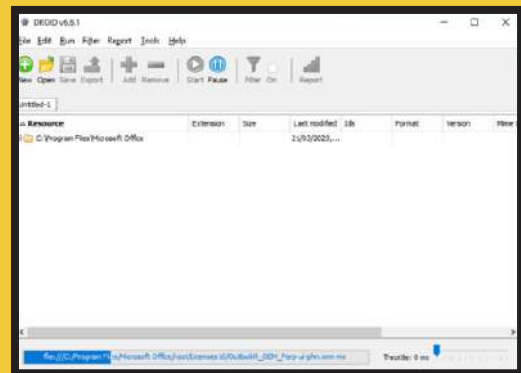
Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengelola file dalam jumlah yang besar dan kita menggunakan DROID untuk melakukan identifikasi file tersebut. Ms Excel memiliki 1.048.576 baris dan 16.384 kolom. Jika file kita melebihi jumlah tersebut, maka proses identifikasi akan berlangsung cukup lama. Untuk menghindari hal ini, kita dapat membagi file DROID kita ke dalam beberapa file sebelum melakukan proses identifikasi.



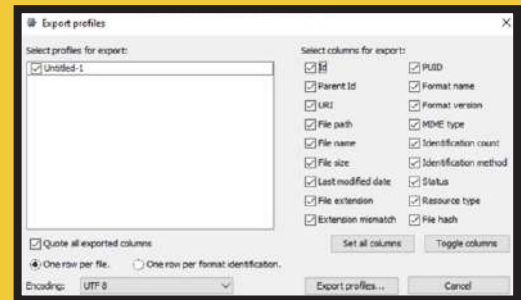
Gambar 2. Profil awal aplikasi DROID



Gambar 3. Pemilihan File untuk Identifikasi



Gambar 4. Proses Identifikasi



Gambar 5. Export Profiles

¹ <https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/>

² Droid file adalah file berbentuk zip yang berisi file XML, digunakan untuk mendeskripsikan profil dan database hasil identifikasi.



Di dalam preservasi arsip secara digital, kita perlu mengetahui informasi yang terdapat dari file yang kita simpan, dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam mengelola arsip digital yang kita miliki. Terdapat 18 informasi yang kita dapatkan dari aplikasi DROID. Aplikasi ini menyusun file dan folder ke dalam beberapa nomor di dalam informasi **ID** dan kita dapat mengetahui apakah file tersebut berada di folder yang sama melalui **Parent ID**. DROID mencatat informasi lokasi tempat disimpannya suatu file dan folder yang diidentifikasinya. Lokasi itu dapat berupa **Uniform Resource Indicator (URI)** dan **File Path**. Nama dari file dapat kita lihat di **File Name** yang juga berisi ekstensi dari file tersebut.

Kita akan menemukan tiga kategori pada kolom **Identification Method**, yakni

extension, signature dan container. Hasil identifikasi **extension** menandakan bahwa file tersebut diidentifikasi berdasarkan ekstensi dari file tersebut. Hasil identifikasi itu bisa saja salah karena file dapat dinamai apapun sesuai keinginan pengguna dan banyak format file dan versinya yang memiliki ekstensi sama. **Signature** berarti format file diidentifikasi dengan menemukan ciri-ciri spesifik di dalam rangkaian bit, biasanya terdapat pada bagian header file yang dibuat unik untuk format file dan versi tertentu. Hasil ini lebih dapat dipercaya dibandingkan **extension**. **Container** menunjukkan bahwa proses identifikasi dilakukan dengan menemukan embedded file, biasanya dengan signature di dalam file utama. Untuk mengetahui apakah proses identifikasi berhasil atau tidak,

DROID membagi hasilnya ke dalam empat **Status**, yaitu *Done*, *Not Found*, *Access Denied* dan *Error*.

Ukuran dari file dapat dilihat di kolom **File Size** dan biasanya dicatat dalam ukuran bit. Besaran dari folder tidak dicatat di dalam aplikasi DROID. Jenis file dapat dilihat pada kolom **Type** dan terdiri dari tiga, yaitu file, folder dan container. Di dalam **File Extension** terdapat informasi tentang bentuk file yang biasanya dimulai dengan tanda titik (.) dan ekstensi file, contoh .pdf, .docx, .xls dan lain-lain. Untuk mengetahui kapan file atau folder tersebut dimodifikasi, kita dapat melihat kolom Last **Modified Date**. Jika ada file yang yang disimpan dengan ekstensi yang salah, maka DROID akan memberikan peringatan dan akan ditampilkan di kolom **File Extension Mismatch Warning**. **Hash (Checksum)**



dapat dihasilkan oleh aplikasi DROID pada setiap file yang diidentifikasinya. Hash biasanya terlihat dalam bentuk algoritma SHA 1, SHA 2 atau MD5. **Hash** adalah barisan angka unik yang panjang yang digunakan untuk mengidentifikasi konten dari suatu file. Jarang sekali terjadi ketika dua file yang berbeda memiliki hash yang sama.

DROID melakukan identifikasi format file termasuk container dari file tersebut (folder biasanya tidak diidentifikasi). Nomor identifikasi ini berada di kolom **File Format Count** dan bermacam-macam, tergantung keberhasilan dan seberapa cocok ekstensi file tersebut. Hasilnya digambarkan dengan zero yang bermakna DROID tidak dapat mengidentifikasi format file, one berarti format dan ekstensi file sesuai dan more than one yaitu file tersebut dapat memiliki beberapa

ekstensi dan *identification signatures*. **PUID** atau **PRONOM Unique Identifier** menetapkan kode unik untuk setiap format file yang telah terdaftar. Hasilnya biasanya diberikan dalam bentuk 'fmt' atau 'x-fmt' dan dapat diklik yang nantinya akan mengarahkan pengguna ke website Arsip Nasional Inggris Raya untuk mengetahui informasi lengkap tentang format file. Mime-Type adalah dua bagian dari alat pendeteksi untuk mengetahui media dari file format tersebut.

Sama seperti PUID dan **Mime-Type**, informasi mengenai nama dari format file juga diberikan melalui kolom **Format Name**. Nama File Format dapat juga dilihat di PUID. Terakhir, kita juga dapat mengetahui versi dari media yang digunakan ketika file tersebut tercipta dengan mengecek kolom **Format Version**.

DROID dapat digunakan

di lembaga negara dan kementerian di Indonesia dalam mengelola arsip digital, agar rencana pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Identifikasi pada setiap arsip digital diperlukan agar kita dapat mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan ketika file mengalami error atau tidak bisa dibuka. Selain itu, proses ini juga akan memudahkan kita untuk menganalisis seluruh arsip digital dengan cepat. Cukup sekian artikel kali ini, jika ada pertanyaan terkait preservasi digital dan aplikasi DROID dapat bertanya secara langsung melalui email

Sumber: <https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/policy-process/digital-continuity/file-profiling-tool-droid/>

**Menjelajahi
Presidential
Libraries and
Museums
Amerika Serikat:**

JAJANG NURJAMAN

BELAJAR ARSIP KEPRESIDENAN DARI PAMAN SAM

“To bring together the records of the past and to house them in buildings where they will be preserved for the use of men and women in the future, a Nation must believe in three things. It must believe in the past. It must believe in the future. It must, above all, believe in the capacity of its own people so to learn from the past that they can gain in judgment in creating their own future.” — Franklin D. Roosevelt

Hyde Park, suatu kawasan di New York Amerika Serikat yang dipenuhi oleh banyak situs sejarah dan juga hutan taman kota, memberikan kesan Amerika Serikat yang berbeda. Kawasan yang luasnya 103,2km persegi ini menyimpan juga satu area Presiden Amerika Serikat yang ke-31, Franklin Delano Roosevelt, atau sering disingkat FDR. Ia memerintah Amerika Serikat dari tahun 1933 hingga 1945. FDR diabadikan dalam bentuk Franklin D Roosevelt Library di Hyde Park. Perpustakaan Presiden Amerika ke-31 ini menyimpan arsip, barang seni, serta artefak dan memorabilia lain miliknya. Perpustakaan ini dibuka atas inisiatif dirinya sendiri yang ingin melestarikan gagasan-gagasan dan pemikirannya. Dia pada awalnya hanya tertarik untuk membangun sebuah monumen untuk dirinya sendiri. Namun, Roosevelt memandang perpustakaan sebagai solusi untuk dua masalah - bagaimana melestarikan sekaligus menyediakan akses publik ke arsip kepresidenannya. Sikapnya adalah “pemerintahan terbuka”, percaya bahwa rakyat Amerika Serikat berhak

untuk melihat lebih baik bagaimana pemerintah mereka bekerja, bahkan di tingkat eksekutif. Pandangan Roosevelt ini kelak menjadi cikal bakal ide membangun sebuah memorial perpustakaan dan arsip kepresidenan di Amerika Serikat. Sejarah Arsip dan Perpustakaan Kepresidenan Amerika Serikat dimulai ketika tahun 1939 Presiden Franklin Roosevelt menyumbangkan surat-surat pribadinya dan surat-surat kepresidenan kepada Pemerintah Federal. Pada saat yang sama, Roosevelt menjaminkan sebagian tanah miliknya di Hyde Park kepada Amerika Serikat, dan sahabat Presiden (semacam sebuah organisasi pendukung Presiden) membentuk perusahaan nirlaba untuk menggalang dana bagi pembangunan perpustakaan dan gedung museum. Sebelum munculnya sistem Arsip dan Perpustakaan Kepresidenan, Presiden atau ahli warisnya sering kali menyebarkan dokumen-dokumen kepresidenan di akhir masa pemerintahannya. Meskipun banyak koleksi pra- Presiden Hoover yang kini berada di Perpustakaan Kongres,

namun ada juga yang tersebar di perpustakaan lain, lembaga-lembaga sejarah, dan koleksi pribadi. Sayangnya, banyak materi yang hilang atau sengaja dihancurkan.

Kebiasaan membangun Perpustakaan dan Memorial ini diteruskan ketika Presiden ke-33 Amerika Serikat, Harry S. Truman (menjabat tahun 1945-1953), membangun perpustakaan di tahun 1950. Kemudian di tahun 1955, Undang-Undang Perpustakaan Kepresidenan (*Presidential Libraries Act*) disahkan oleh Kongres dan menjadi peraturan formal pertama yang mengatur arsip-arsip presiden Amerika Serikat dikelola pemerintah dan juga memastikan pelestariannya oleh pemerintah serta menjamin ketersediaan aksesnya bagi rakyat Amerika.

Undang-Undang Perpustakaan Kepresidenan selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-Undang Arsip Kepresidenan atau *Presidential Records Act* yang disahkan tahun 1978. Undang-Undang ini memungkinkan Presiden Amerika Serikat lainnya untuk

mendonasikan arsip dan benda-benda bersejarah ke negara untuk dipreservasi dan diakses oleh masyarakat luas.

Konsep Arsip Kepresidenan di Amerika Serikat

Amerika Serikat membedakan antara arsip yang tercipta oleh Presiden sebagai pribadi, dan arsip yang tercipta pada saat Presiden menjabat sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Arsip Kepresidenan:

Presidential records are defined as: "documentary materials, or any reasonably segregable portion thereof, created or received by the President, the President's immediate staff, or a unit or individual of the Executive Office of the President whose function is to advise and assist the President, in the course of conducting activities which relate to or have an effect upon the carrying out of the constitutional, statutory, or other official or ceremonial duties of the President." [44 U.S.C. § 2201(2)].

dan

Personal records are defined as: "documentary materials or any reasonably segregable portion thereof, of a purely private or nonpublic character, which do not relate to or have an effect upon the carrying out of the constitutional, statutory, or other official or ceremonial duties of the

President" and which include "diaries, journals, or other personal notes serving as the functional equivalent of a diary or journal which are not prepared or utilized for, or circulated or communicated in the course of, transacting Government business," "private political associations" and "materials relating exclusively to the President's own election to the office of the Presidency" [44 U.S.C. § 2201(3)].

Oleh karenanya, arsip pribadi Presiden tetap menjadi milik Presiden itu sendiri atau tetap menjadi milik pencipta arsipnya. Arsip yang diciptakan oleh Presiden terpilih dan tim transisi juga dianggap sebagai arsip pribadi. Sejauh arsip-arsip ini diterima dan digunakan setelah pelantikan oleh Pemerintahan Presiden yang baru, arsip-arsip ini dapat menjadi arsip Presiden atau arsip Federal. Para mantan Presiden secara tradisional menyerahkan arsip transisi pribadi ini kepada Arsip Nasional Amerika untuk disimpan di Perpustakaan Kepresidenan.

Lembaga-Lembaga pencipta arsip yang memiliki arsip kepresidenan antara lain yang termasuk ke dalam *Executive Office of President (EOP)*:

1. *The White House Office*
2. *The Office of the Vice President*
3. *The Office of Policy Development*
4. *The Council of Economic Advisors*
5. *The National Security Council*
6. *The President's Foreign Intelligence Advisory Board*
7. *The President's Intelligence Oversight Board*
8. *The National Economic Council*

9. *The Office of Administration*

Selain itu, ada juga lembaga yang lain seperti:

1. *The Office of Management and Budget*
2. *The Office of the United States Trade Representative*
3. *The Council on Environmental Quality*
4. *The Office of Science and Technology Policy*
5. *The Office of National Drug Control Policy*

Peranan Arsip Nasional Amerika Serikat

NARA atau National Archives and Records Administration atau Arsip Nasional Amerika Serikat, mendapatkan wewenang yang cukup besar di dalam Undang-Undang Arsip Kepresidenan untuk mengelola arsip-arsip Presiden Amerika Serikat. Peranan NARA menjadi lebih kuat karena keberadaan Undang-Undang tersebut. Berikut adalah beberapa peranan NARA dalam melestarikan arsip kepresidenan:

1. Membantu membuat panduan atau kebijakan mengenai pengelolaan arsip presiden yang sedang menjabat sesuai dengan keahlian NARA dan berdasarkan permintaan presiden;

Staf Gedung Putih yang bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem arsip harus dilatih untuk menjaga arsip pribadi terpisah dari arsip Kepresidenan pada

Gambar 1 Perpustakaan dan Museum Kepresidenan Franklin D Roosevelt

saat pembuatannya. Sekali arsip tercampur, maka akan sulit untuk menentukan status arsip. Karena Presiden memiliki keleluasaan untuk menentukan apa yang termasuk materi pribadi, maka penentuan ini harus dilakukan selama masa jabatan Presiden, bukan setelah arsip tersebut dipindahkan ke NARA.

2. Membantu untuk memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna (*administrative, historical, informational, atau evidential value*) dan melakukan review atas permohonan pemusnahan dari Presiden petahana;

Dalam keadaan tertentu, Arsiparis harus memberitahu Kongres mengenai usulan pemusnahan tersebut. Dalam kasus-kasus seperti ini, Presiden harus menunggu setidaknya enam puluh hari legislatif sebelum memusnahkannya. Setelah masa jabatan Presiden berakhir, Arsiparis memiliki kewenangan untuk memusnahkan arsip-arsip Kepresidenan, setelah ada pemberitahuan ke publik dan masukan dari masyarakat.

3. Memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Departemen Kehakiman untuk keterbukaan arsip dan akses arsip;

NARA memberi tahu Kantor Penasihat Gedung Putih mengenai permintaan arsip mantan Presiden (1) yang saat ini tidak dibuka untuk umum atau sedang diminta berdasarkan salah satu kategori pengecualian terhadap pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang Arsip Kepresidenan (“permintaan akses khusus”) dan (2) yang sedang diusulkan untuk dibuka untuk umum. NARA juga memberitahukan kepada perwakilan mantan Presiden dan Wakil Presiden yang menciptakan arsip-arsip tersebut.

4. Memberitahukan kepada Presiden saat ini dan mantan

Presiden mengenai permintaan dan usulan pengungkapan arsip mantan Presiden.

NARA bertanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan kepada Presiden yang sedang menjabat dan mantan Presiden sebelum akses dari luar terhadap arsip mantan Presiden dapat diberikan. NARA juga memberikan salinan pemberitahuan tersebut kepada Kantor Penasihat Hukum di Departemen Kehakiman.

Selain peranan tersebut, NARA juga membantu dalam hal:

- Menyediakan, atas permohonan Gedung Putih, panduan pengelolaan arsip yang berdasarkan pada Undang-Undang, pengelolaan arsip pribadi dan hadiah-hadiah presiden
- Menyediakan storage untuk arsip dan hadiah-hadiah presiden dan wakil presiden
- Menyediakan panduan dan persetujuan untuk pelatihan kearsipan bagi kantor administrasi presiden
- Membantu perencanaan dan juga pengelolaan *Presidential Library*
- Merencanakan dan mengeksekusi material kepresidenan pada akhir masa jabatan ke lokasi *Presidential Library* yang akan dibangun
- Mengelola *Presidential Diary* dengan memberikan rekomendasi *Presidential Diarist*
- Menyunting dan menerbitkan ringkasan harian arsip kepresidenan dan public papers.

Akses Arsip Kepresidenan

Untuk Perpustakaan Kepresidenan yang lebih tua (Presiden Hoover hingga Carter, dengan pengecualian Nixon), akses ke perpustakaan diatur berdasarkan akta hibah, dan arsip

diproses sesuai dengan rencana yang diprioritaskan. Rencana-rencana ini sering kali dikembangkan berdasarkan masukan dari para Presiden sebelumnya. Bidang utama yang menjadi minat penelitian saat ini dan ketepatan waktu topik di arena nasional juga dipertimbangkan. Materi Kepresidenan Nixon diatur oleh *Presidential Recordings and Materials Preservation Act* (PRMPA), dan materi ditinjau sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Untuk Perpustakaan yang lebih baru (mulai dari Reagan), kepemilikannya diatur oleh *Presidential Records Act* (PRA) tahun 1978. Berdasarkan PRA, arsip tersebut dikecualikan dari rilis publik selama lima tahun setelah berakhirnya pemerintahan Presiden. Selama periode lima tahun ini, arsiparis mulai memproses dan menyiapkan materi untuk dapat diakses oleh peneliti.

Setelah masa lima tahun berakhir, semua arsip Presiden tunduk pada *Freedom of Information Act* (FOIA). Permintaan ini harus dibuat secara tertulis dan mengutip Undang-Undang Kebebasan Informasi dan kemudian diserahkan ke Perpustakaan yang sesuai melalui surat, email, faks, atau secara langsung. Perpustakaan yang kepemilikan Presidennya diatur oleh PRA bekerja untuk menanggapi permintaan FOIA dari masyarakat umum. Mereka memproses arsip dan menyediakannya untuk umum tidak hanya bagi pemohon tetapi juga bagi siapa saja yang tertarik melakukan penelitian mengenai topik tertentu yang tercakup dalam permintaan FOIA.

Untuk arsip yang dikecualikan adalah yang termasuk ke dalam kategori sebagai berikut:

- Informasi terkait keamanan nasional berdasarkan Perintah Eksekutif
- Informasi terkait penunjukan ke Federal Office
- Informasi yang memang



Gambar 3 Akses online website John F Kennedy Library and Museum, www.jfklibrary.org



Gambar 4 Contoh arsip dari Perpustakaan Kepresidenan Amerika Serikat yang bisa diakses online

dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan

- Informasi rahasia perdagangan dan bisnis yang sifatnya confidential
- Komunikasi rahasia yang meminta nasihat antara Presiden dan penasihatnya atau antara dewan penasihat
- Informasi yang jika dibuka akan menyebabkan pelanggaran privasi pribadi.

Akses arsip bisa dilakukan secara *offline* dan *online*. Sejak Presiden Obama, kebijakan baru mulai diterapkan, yaitu pelestarian terhadap arsip-arsip yang terlahir digital. Pada bulan Mei 2017, Obama Foundation, sebuah entitas swasta, membuat keputusan untuk tidak membangun Perpustakaan Kepresidenan bagi NARA untuk menyimpan arsip kertas dan artefak fisik. Sebagai gantinya, Obama Foundation berencana untuk membangun dan mengoperasikan museum pribadi

dan pusat kepresidenan di Chicago. NARA akan mendigitalkan dan kemudian menyimpan serta melestarikan semua arsip dan artefak kepresidenan asli di fasilitas NARA yang sudah ada dan memenuhi standar penyimpanan arsip NARA. NARA memiliki hak kepemilikan hukum dan fisik atas arsip dan artefak tersebut. NARA akan memelihara, melestarikan, menyediakan akses ke arsip kepresidenan pemerintahan Obama, sesuai dengan Undang-Undang Arsip Kepresidenan, dengan menggunakan model digital untuk mengakses arsip yang telah dibuka dan meminjamkan materi untuk dipamerkan di seluruh dunia, termasuk di Pusat Kepresidenan Obama yang bersifat pribadi. Program pendidikan dan publik, baik secara langsung maupun virtual, juga akan menjadi komponen penting dari Perpustakaan Kepresidenan Obama.

Penutup

Indonesia dapat mengadopsi konsep arsip kepresidenan yang ada di Amerika Serikat. Dengan bekerja sama dengan perpustakaan pribadi presiden, atau museum atau galeri presiden yang sudah ada dan dibangun sebelumnya, seperti Balai Kirti, Museum Sukarno di Blitar, Memorial Jenderal besar H.M Soeharto di Bantul, Museum B.J Habibie di Pare-Pare, The Wahid Institute di Jakarta, Megawati Institute di Jakarta dan Museum dan Galeri Seni SBY ANI di Pacitan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tidak perlu lagi membangun banyak memorial presiden, karena akan dibantu oleh yayasan-yayasan presiden masing-masing yang kemungkinan besar masih menyimpan arsip-arsip atau artefak penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Yang dapat ANRI lakukan adalah membantu pelestarian dan perawatan arsip-arsip tersebut dan membuatkan pedoman-pedoman untuk mengelola arsip-arsip presiden (baik untuk presiden yang pernah menjabat ataupun presiden yang sedang menjabat) dan memorabilia kepresidenan yang bernilai sejarah, agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

“The history of free men is never really written by chance--but by choice--their choice.” - Dwight D. Eisenhower, Address in Pittsburgh, Pennsylvania, 10/9/56



FOTO: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY

Melestarikan Kebudayaan melalui Kearsipan:

Kisah Sukses Yogyakarta

Memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan tertinggi dalam skala nasional selama dua tahun berturut-turut di lingkungan pemerintah provinsi, tentu bukan hal yang mudah dan instan diraih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ada berbagai upaya dan motivasi yang terus dilaksanakan dan dipelihara oleh jajaran Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) DIY yang dipimpin Monika Nur Lastiyani untuk berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di DIY, sehingga hasil pengawasan kearsipan pun dapat mencerminkan kualitas pengelolaan arsip di DIY.

Tahun 2021 menjadi kali pertama bagi DIY meraih peringkat I nasional hasil pengawasan kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi dengan nilai 93,91 dan kategori AA (Sangat Memuaskan). Tahun 2022, prestasi kembali terulang, hasil pengawasan kearsipan yang diraih Provinsi DIY menempati posisi teratas dengan raihan nilai 96,16 dan kategori AA (Sangat Memuaskan).

Adapun pada 2020 Provinsi DIY hanya memperoleh kategori A (Memuaskan) dengan nilai 89,38. Capaian nilai hasil pengawasan kearsipan ini sejatinya dapat memotret perkembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di DIY. Tetapi berada pada kategori Sangat Memuaskan, LKD DIY melalui berbagai liku perjalanan.

Ditemui di sela-sela kesibukannya oleh tim redaksi majalah ARSIP, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY yang juga berperan sebagai Kepala LKD, Monika Nur Lastiyani menyampaikan bahwa beberapa tahun lalu, bidang kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY masih belum memperoleh perhatian serius. “Dulu ya kalau kita datang ke OPD - OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu mau melakukan pembinaan kearsipan, kalau dulu kan ditinggal pergi ya. Ngerti kan ya, kalau dulu kan ditinggal pergi.... Sementara kita kok ditinggal pergi gitu ya. Padahal kita mau melakukan pembinaan

kearsipan,” cerita wanita yang akrab disapa Bu Monik. Namun kondisi ini tak lantas membuat Monik dan jajaran menyerah, DPAD DIY justru mencari cara dan peluang agar bidang kearsipan dapat diperhatikan di unsur pemerintahan.

Budaya Inovasi dan Kemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi

Sebagai salah satu provinsi yang menjunjung tinggi kebudayaan, Provinsi DIY memiliki visi “Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan), Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Terdapat 4 (empat) misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut. Adapun bidang kearsipan memiliki keeratatan dengan misi ketiga, yaitu meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

Keterkaitan dengan misi

penyelenggaraan pemerintahan di daerah tentu akan turut berdampak pada rumusan program dan kegiatan pada tiap OPD. Pada bidang kearsipan di Provinsi DIY, terdapat program Pelestarian dan Layanan Arsip serta Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mendukung mewujudkan misi ketiga Provinsi DIY tersebut. Program Pelestarian dan Layanan Arsip ini merupakan program yang cukup signifikan untuk penguatan identitas Yogyakarta sebagai sebuah kota budaya, dengan mengembangkan kearsipan sebagai upaya mendukung, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal. Terdapat beberapa kegiatan kearsipan yang dilaksanakan, seperti penyimpanan arsip, alih media ataupun digitalisasi arsip dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal, sebagai upaya penyelamatan arsip bernilai guna sekunder dan bersejarah untuk penguatan keistimewaan Provinsi DIY.

Selain itu, pada program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan, juga turut memberikan pengaruh yang signifikan dalam kegiatan pengarsipan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bukti akuntabilitas kinerja serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kearsipan. Pada sumber pembiayaan program dan kegiatan kearsipan di Provinsi DIY memiliki keunikan tersendiri. Menurut Monik, sumber pembiayaan kegiatan kearsipan terdiri dari dua hal, pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kedua dana keistimewaan DIY. Dana keistimewaan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan di DIY. Adapun penggunaan dana keistimewaan tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan keistimewaan DIY,

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Lalu, apa kaitannya kearsipan dengan dana keistimewaan dan mengapa dapat menggunakan dana keistimewaan? Pada wawancaranya kali ini, Monik menjelaskan alasannya, yakni dikarenakan 75% penyangga pilar keistimewaan itu ada di budaya. "Saat ada di budaya maka penyelenggaraan kearsipan dan penyelenggaraan perpustakaan bisa masuk ke sana. Dan kenapa bisa menyangga budaya juga? Karena DPAD itu memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan kearsipan, baik di keraton maupun puro yang notabene keraton dan puro ini kan pilar budaya," papar Monik. Dengan demikian pelestarian arsip statis yang dilaksanakan DPAD DIY pun tidak sebatas hanya yang disimpan di depot arsip statis DPAD DIY, tetapi juga mencakup arsip yang ada di keraton dan puro.

Kendati demikian, meski program kearsipan memiliki kontribusi dalam pewujudan visi dan misi Provinsi DIY, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki dua sumber pendanaan yakni dari APBD dan dana keistimewaan, untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian sadar dan tertib arsip pada penyelenggara pemerintah tetap memerlukan terobosan-terobosan. Ini tak lain dilakukan agar kegiatan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPAD DIY, tetapi turut dipikul dan menjadi perhatian bersama oleh seluruh entitas penyelenggara pemerintahan di lingkungan Provinsi DIY.

Kearsipan Salah Satu Indikator TPP DIY

Menurut Monik, ada beberapa cara yang sudah ditempuh untuk menumbuhkan perhatian terhadap bidang kearsipan di Provinsi DIY.

Terdapat satu cara yang pada akhirnya mampu dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Provinsi DIY. "...kami mencoba untuk masuk ke sana. Bagaimana supaya pengelolaan kearsipan bisa mempengaruhi penerimaan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Di Pemda DIY ini beda dengan Pemda yang lain, yang aman TPP itu diberikan berdasarkan pangkat golongan, kalau di kami berdasarkan kinerja," terang Monik.

Saat ini TPP di lingkungan Provinsi DIY diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. Berdasarkan regulasi tersebut, pengelolaan arsip menjadi salah satu kriteria dalam penilaian kinerja yang akan mempengaruhi TPP di lingkungan Provinsi DIY. Terdapat 6 (enam) kriteria penilaian kinerja tiap OPD, yaitu: perencanaan, pengawasan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan arsip. Terdapat 5 (lima) OPD yang mampu penilaian kinerja tiap OPD, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan DPAD. Dengan adanya penilaian kriteria tersebut, kualitas pengelolaan arsip di tiap OPD menjadi salah satu indikator dan faktor penentu penerimaan TPP.

"Ada 6 (enam) indikator yang dijadikan alat ukur untuk menentukan kinerja OPD dan pengukuran kinerja itu dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. Jadi setiap 3 (tiga) bulan kami itu terima rapor dari Pak Gubernur. Setiap OPD itu terima rapor dari gubernur berdasarkan 6 (enam) indikator itu tadi. Besaran TPP yang didapat itu sesuai nilai rapor. Setiap bulan

selalu berbeda. Penerimaannya tidak akan sama,” jelas Monik. Indikator kearsipan tersebut dinilai oleh DPAD DIY setiap bulan selanjutnya nilainya diakumulasi dengan indikator lain yang ternyata memberikan dampak luar biasa terhadap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Provinsi DIY. Akumulasi penilaian ini pun menjadi reward dan punishment tersendiri bagi penyelenggara pemerintahan di Provinsi DIY. Kondisi ini pun memotivasi tiap OPD untuk tidak berada di zona merah. Bahkan, untuk bidang kearsipan, tiap OPD bersikap inisiatif dan proaktif untuk melakukan konsultasi kepada DPAD DIY.

Kendati demikian, DPAD DIY pun tidak hanya melakukan penilaian, tetapi juga beriringan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan yang dilakukan OPD juga melaksanakan pengawasan kearsipan internal. Saat ini terdapat 37 OPD dan 52 Unit Pelaksana Teknis yang dibina oleh DPAD DIY.

KINARYA, Memotret Penyelenggaraan Kearsipan DIY

Berdasarkan data yang dihimpun DPAD DIY, sampai dengan semester I tahun 2023 hasil pengawasan kearsipan internal DPAD DIY menunjukkan hasil bahwa 16 OPD meraih kategori Sangat Memuaskan, 18 OPD kategori Memuaskan dan 3 OPD kategori Sangat Baik. Berada pada capaian ini tentu bukan hal yang mudah, DPAD terus berbenah dari waktu ke waktu untuk memastikan agar OPD dapat mengelola arsipnya sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan kearsipan internal telah secara rutin dilaksanakan DPAD DIY, pun ketika kondisi pandemi

COVID-19. Bahkan ketika pandemi COVID-19 berlangsung, DPAD DIY justru melahirkan inovasi berupa pengawasan kearsipan internal yang sudah berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan merilis aplikasi KINARYA. Aplikasi KINARYA yang dibangun dan dilakukan uji coba tahun 2021 kepada OPD di lingkungan DIY, saat ini digunakan untuk Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Pemerintah Provinsi DIY, pengelolaan arsip dinamis di OPD seperti entry daftar arsip aktif sampai dengan penyusutan arsip dan saat ini telah mengakomodir Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) untuk audit kearsipan pada LKD kabupaten/kota di wilayah Provinsi DIY. Namun, saat ini penggunaan ASKE pada aplikasi KINARYA masih dalam tahap sosialisasi kepada LKD kabupaten/kota.

Menurut Monik, kehadiran aplikasi KINARYA menjadi sebuah cara untuk mengetahui sejauh mana kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Provinsi DIY. “Nah dengan aplikasi KINARYA itu, OPD bisa melakukan self assessment pengelolaan kearsipannya.... Kami akan mendatangi dan mendampingi apabila memang ada OPD-OPD yang nilainya kurang. Atau kalau kami melihat, kok janggal ya ini ya? Nah itu baru kami datangi, kami lakukan visitasi. Kemudian dengan aplikasi KINARYA ini, maka potret penyelenggaraan kearsipan di semua OPD jadi kelihatan, jadi jelas,” terang Monik.

Lahirnya aplikasi KINARYA ini menjadi salah satu bukti bahwa, pada saat kondisi pandemi COVID-19, entitas kearsipan di daerah mampu berinovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan TIK, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu. Salah satunya

yakni kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap OPD masih dapat terus berjalan tanpa dilakukan secara tatap muka.

Selain melaksanakan pembinaan kearsipan kepada penyelenggara pemerintahan, DPAD juga turut melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kearsipan kepada organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan masyarakat umum. Terdapat beberapa program dan kegiatan sosialisasi kearsipan kepada masyarakat, seperti Arsip Menyapa dan Pendampingan Pengelolaan Arsip di Desa Mandiri Budaya. Arsip menyapa ini mulai dilaksanakan tahun 2022 dengan merilis tayangan melalui media elektronik televisi lokal yang melibatkan narasumber anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akademisi, pemerhati, dan DPAD DIY. Adapun Pendampingan Pengelolaan Arsip di Desa Mandiri Budaya mulai dilaksanakan tahun 2023 dengan kegiatan kunjungan dan pendampingan kepada aparat dan petugas di Kalurahan sebagai ujung tombak pengelolaan arsip di desa.

Melestarikan Arsip Statis

Selain menunaikan tugas dalam hal pembinaan dan pengawasan kearsipan, DPAD juga tetap memperhatikan tugas lainnya yang diemban oleh LKD, seperti implementasi aplikasi SRIKANDI, pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Sampai dengan tahun 2022, jumlah arsip statis yang dilestarikan DPAD DIY sebanyak 53.508 berkas (2.589 boks). Arsip statis yang disimpan juga terdiri dari berbagai macam media, seperti kertas, peta, kearsitekturan,

foto, video. Ruang penyimpanannya pun sudah disimpan dalam sarana dan prasarana yang diatur dalam peraturan perundangan. Bahkan dalam hal pengelolaan simpul jaringan, kinerja DPAD DIY juga diakui dengan berhasil diraihinya penghargaan simpul jaringan JIKN terbaik nasional tahun 2022 dan 2023 dan menjadi Simpul Jaringan Pilot Project (SJPP) tahun 2022 dan 2023.

Selain itu, DPAD juga berupaya responsif apabila terjadi bencana alam atau sosial, dengan melaksanakan koordinasi dengan pencipta arsip serta OPD yang membidangi penanggulangan bencana untuk melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip. Demikian pula halnya apabila terjadi penggabungan dan/atau pembubaran suatu OPD, BUMD, dan lembaga lainnya, pemekaran kabupaten/kota di daerah, DPAD DIY juga berupaya untuk melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip instansi tersebut.

Menurut Monik, saat ini OPD di lingkungan Provinsi DIY sudah mulai rutin untuk melaksanakan penyusutan arsip, baik melaksanakan pemusnahan arsip maupun penyerahan arsip statis. Bahkan arsip COVID-19 yang berada di OPD juga sudah mulai diserahkan kepada DPAD DIY. "...yang terakhir kemarin menyerahkan arsip sampai dengan 1 (satu) truk kayaknya, itu arsip Covid, ya ada arsip Covid dari BPBD, dari dinas sosial, dari dinas kesehatan, dari Biro Umum. Itu sudah menyerahkan arsip Covid-nya. Jadi arsip Covid sudah sampai ke kami," jelas Monik.

Penyelamatan arsip COVID-19 yang dilakukan DPAD ini menjadi bukti bahwa LKD dalam hal ini DPAD mampu melaksanakan amanat Surat Edaran Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 dalam

Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Arsip yang telah diselamatkan tersebut nantinya dapat menjadi bukti dan memori kolektif yang menggambarkan upaya-upaya Pemerintah Provinsi DIY dalam mengendalikan dan menangani pandemi COVID-19 dalam berbagai sektor kehidupan.

Tak Henti Berinovasi

Meski telah banyak capaian dan prestasi yang diraih Provinsi DIY di bidang kearsipan, hal ini tak lantas membuat DPAD DIY berpuas diri. Monik menjelaskan, bahwa Ia dan jajarannya terus berupaya melakukan berbagai inovasi dan perbaikan di bidang kearsipan. Apalagi setiap OPD di DIY dituntut Gubernur untuk memiliki inovasi. Belum lama ini, inovasi kearsipan yang dilakukan Provinsi DIY dan mampu menyita perhatian masyarakat tidak hanya di DIY, ialah Diorama Arsip Yogya. Diorama tersebut menyuguhkan sejarah DIY secara runtut, selama kurang lebih 430 tahun dari masa Panembahan Senopati hingga Keistimewaan DIY. Melalui Diorama Arsip Yogya yang dibangun dengan teknologi hologram yang interaktif serta teknologi Augmented Reality, juga dapat menjadi alat edukasi yang berguna dalam memberikan wawasan tentang bagaimana LKD bekerja dan menunjukkan bahwa pengelolaan arsip sangat penting dalam menjaga serta pembelajaran warisan sejarah dan budaya. Selain itu, terdapat pula aplikasi KINARYA yang juga menjadi bagian inovasi DPAD DIY serta kegiatan Arsip Menyapa dan Wisata Arsip yang dirilis DPAD DIY untuk mendekatkan arsip kepada masyarakat.

Sebuah Asa

Meski pengakuan atas kinerja

bidang kearsipan Provinsi DIY sudah ditunjukkan nyata, kondisi ini tak lantas membuat Monik dan jajaran pegawai di DPAD DIY sudah merasa puas. Monik dan tim terus berkomitmen untuk melindungi dan memelihara warisan budaya dan sejarah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas daerah. Oleh karenanya, menurut Monik, masih ada beberapa "PR" yang harus diselesaikan, di antaranya mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI secara utuh dan menyeluruh di lingkungan Provinsi DIY dan menyempurnakan kenyamanan pada ruang penyimpanan arsip statis dan inaktif.

Selain itu, Monik juga menyampaikan bahwa diorama yang dibangun dengan cinta dan dedikasi oleh DPAD DIY juga memerlukan perhatian khusus. Diorama ini menjadi alat yang berharga dalam menyampaikan nilai kearsipan dan sejarah kepada masyarakat. DPAD harus menjaganya dengan baik, memastikan keasliannya tetap terpelihara, dan terus menginspirasi para pengunjung yang datang. "Jangan sampai kita kena stigma bahwa plat merah itu hanya bisa membangun tapi tidak bisa memelihara. Itu sudah saya siapkan dengan saya membuat kajian, kajian yang dibuat sudah mencakup 5 (lima) tahun kedepan, tahun depan harus melakukan apa di diorama, anggarannya berapa itu sudah ada di kajian, sehingga nanti penerus saya tidak akan kesulitan lagi," tutup Monik yang akan mengakhiri pengabdianya sebagai Aparatur Sipil Negara pada awal tahun 2024 ini. Semoga layanan arsip yang disajikan DPAD DIY dan Diorama Arsip Yogya akan terus menjadi jendela yang mengungkapkan kekayaan sejarah dan budaya Yogyakarta. (tk)

VIDEO SPECTRAL COMPARATOR: GAWAI PEMBANTU PENENTU AUTENTISITAS ARSIP

Oleh: Oci Hendra Satria



FOTO: DOK. ANRI

Pernahkah anda menyaksikan salah satu serial televisi populer dan bertahan lama di dunia yang bertemakan forensik, *CSI (Crime Scene Investigation)*? Jika ya, selamat anda adalah salah satu penonton yang pernah melihat alat yang digunakan dalam investigasi forensik suatu dokumen untuk memperkuat bukti-bukti yang ditemukan.

Salah satu serial tv yang melahirkan banyak *franchise* ini dalam suatu episodenya pernah menampilkan tentang *video spectral comparator*, alat yang dimaksud pada paragraf diatas. Digambarkan pada episode tersebut gawai ini ada dalam laboratorium yang digunakan oleh suatu tim forensik di negara Amerika Serikat.

Video Spectral Comparator jika merujuk pada laman pencarian *google.com* dapat digunakan dalam melakukan suatu pengujian terkait dengan kondisi fisik suatu dokumen. Analisis sidik jari digital, identifikasi tulisan tangan, bahan yang digunakan untuk menentukan asal-usul alat tulis atau tinta yang digunakan untuk

menulis dokumen, maupun analisis foto dalam dokumen dengan cara memperjelas detail gambar foto tersebut adalah contoh fungsi-fungsi yang dapat dilakukan gawai ini. Serta juga dapat melakukan proses pembacaan dalam pengujian kertas yang memiliki suatu *security paper* maupun *security printing* seperti tanda air, serat berpendar hingga teks mikro dan yang terbaru adalah hologram tiga dimensi.

Video Spectral Comparator sendiri sebenarnya adalah berupa suatu sistem komposit terintegrasi yang mencakup kamera dengan sensitivitas tinggi, ragam sumber cahaya baik sinar laser, ultra violet, infra red, maupun lampu pendukung lainnya seperti koaksial dan filter-filter yang membantu dalam perbandingan suatu dokumen yang dipertanyakan. Namun yang perlu dicatat hasil pemeriksaan yang diperoleh dari gawai ini masih bersifat indikatif dan bukan merupakan suatu instrumen analisis oleh karena itu dibutuhkan opini dan pengetahuan dari para ahli dibidangnya untuk melakukan proses penarikan kesimpulan.

Fungsi-fungsi pada *Video Spectral Comparator* sejatinya memanfaatkan pencahayaan dan prinsip elektromagnetis, dimana terdapat kerja-kerja yang berkaitan langsung pada penangkapan panjang gelombang cahaya, pengoperasian sinar UV dan Inframerah, indikasi terhadap tinta dan bahan serta tampilan langsung (*real-time*) pada layar penampil. Sebagai contoh, pengguna *Video Spectral Comparator* dapat melakukan pengukuran nilai absorbansi/transmisi/refleksi cahaya pada suatu tinta dengan tinta lainnya dengan membaca hasil grafik yang ditampilkan, dimana ini berguna dalam melakukan pengujian karakteristik tinta.

Berawal dari Garasi Rumah

Saat ini dalam dunia gawai forensik dokumen terdapat dua merk dagang besar *Video Spectral Comparator* yang digunakan secara masif pada otoritas imigrasi, lembaga pemerintahan dan laboratorium forensik, yaitu Regula dan Foster & Freeman. Regula sendiri merupakan produsen asal Belarusia yang berdiri pada tahun 1992 yang menahbiskan dirinya sebagai perusahaan pertama yang memiliki keahlian dalam bidang autentikasi uang kertas dan saat ini telah bekerjasama dengan interpol guna menyokong logistik peralatan forensik dokumen.

Sedangkan Foster & Freeman adalah perusahaan yang telah berkecimpung dalam alat forensik selama kurang lebih 40 tahun dimana produk awalnya adalah *ESDA (Electro Static Detection Apparatus)* sebuah alat pengujian forensik dokumen yang memanfaatkan listrik statis pada suatu dokumen tulisan tangan. Foster dan Freeman mulai mengembangkan *Video Spectral Comparator* pada tahun 1990-an

dan dinamakan VSC-1 yang memiliki fitur penting berupa pemanfaatan sinar ultra violet dan Infra merah, uniknya dalam proses pengembangan peralatan forensiknya Foster&Freeman ini pernah dilakukan di dalam suatu garasi rumah di sudut tenggara Inggris.

Diketahui hingga saat ini Foster&Freeman sudah memiliki sepuluh seri alat dan mikroskop khusus pengujian forensik dokumen yang terbaru adalah VSC 900, VSC 80 dan VSC PDi+ untuk ukuran yang lebih lebih kecil dan biasanya digunakan untuk pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen identitas.

Lalu merk terakhir adalah *Projectina*, suatu perusahaan yang berbasis di Swiss ini telah menjadi provider alat pemeriksaan forensik dokumen selama kurang lebih 75 tahun, awalnya Projectina ini adalah perusahaan produsen Mikroskop dan mulai tahun 2000-an mengembangkan lini produksinya pada alat pemeriksaan dokumen dengan salah satu produk unggulannya adalah Docucenter Nirvis yang dipakai banyak laboratorium forensik di benua Eropa dan Amerika namun sayangnya saat ini belum ada produk yang masuk di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia.

Peran Video Spectral Comparator dalam Uji Autentisitas Arsip Konvensional

Dunia kearsipan khususnya di Indonesia di era disruptif ini juga sudah seharusnya mengambil langkah-langkah yang tepat, cermat, dan objektif dalam menjalankan salah satu amanat dari Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yaitu menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Arsip autentik yang diterangkan pada undang-undang tersebut adalah arsip yang memiliki struktur, isi dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.

Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pembina bidang



FOTO: DOK. ANRI

kearsipan nasional harus segera mengambil peran dalam hal tersebut. Mau tidak mau atau suka tidak suka, Arsip Nasional Republik Indonesia harus bertransformasi dalam pengelolaan khasanah yang dimilikinya, baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik.

Transformasi disini dimaksudkan bahwa agar terjadinya perubahan paradigma dari yang tradisional dengan sesuatu yang lebih modern, mengadopsi teknologi yang lebih mumpuni dan berkualitas. ANRI memang telah mengawalinya dengan adanya SPBE SRIKANDI yang merupakan hasil kolaborasi dari tiga institusi negara ini, ANRI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, namun patut juga diperhatikan sektor lainnya.

Salah satunya adalah pada penerapan teknologi dalam kegiatan Autentikasi Arsip statis Konvensional

yang juga harus diperhatikan, dengan adanya bantuan alat pemeriksaan forensik dokumen seperti Video Spectral Comparator yang melalui fungsinya dapat membantu memberikan indikator-indikator yang berkaitan dengan keaslian, kesesuaian, kompatibilitas suatu arsip statis konvensional.

Arsip Nasional Republik Indonesia dalam produk hukumnya yang terbaru yaitu Pedoman Autentikasi Arsip Statis juga telah menyaratkan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna menunjang kegiatan autentikasi arsip statis ini, penggunaan alat Video Spectral Comparator juga telah disebutkan khususnya pada pengujian fisik arsip yang memiliki parameter-parameter khusus. Tentunya seperti yang disebutkan sebelumnya, fungsi instrumen ini dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam uji autentisitas arsip statis. ■

Working Principle of Video Spectral Comparator (VSC)

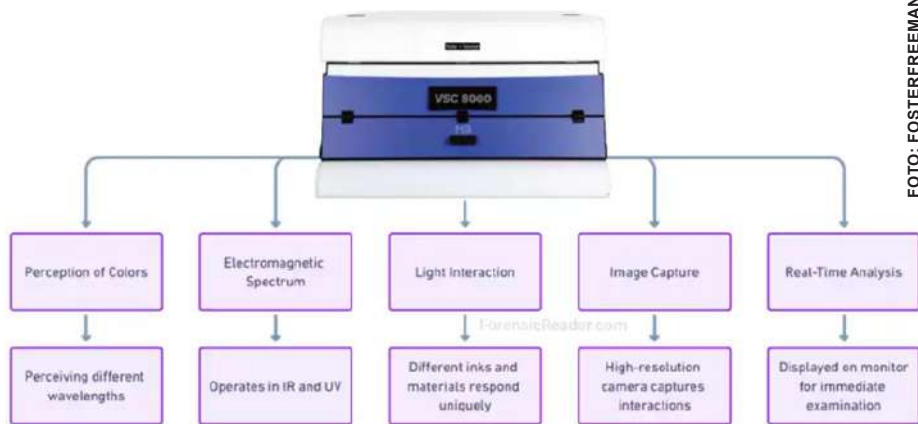


FOTO: FOSTERFREEMAN.COM



Oleh: Rayi Darmagara

MEMPERKUAT GEOPOLITIK INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakter negara kepulauan (*archipelagic state*) menempatkan arsip sebagai alat atau instrumen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, arsip menggambarkan serta mencerminkan jati diri, memori kolektif bangsa sekaligus sebagai simpul pemersatu bangsa. Apabila disejajarkan dengan konsep geopolitik yang menjadi landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidup suatu bangsa maka arsip yang terkait dengan batas wilayah Indonesia baik di darat, laut/perairan atau di udara sangat menentukan eksistensi negara

Indonesia sehingga perlu diperlakukan dan dikelola dengan “istimewa”.

Presiden Soekarno pada pidatonya di bulan Mei 1965 menyampaikan bahwa sebuah bangsa tidak dapat dibangun dan sebuah negara yang kuat tidak dapat tercipta apabila pengetahuan geopolitiknya minim. Soekarno menegaskan bahwa pertahanan nasional hanya dapat dilaksanakan secara sempurna bila suatu bangsa mendasarkan pertahanan nasional atas pengetahuan geopolitik. Konteks geopolitik Indonesia adalah mempertahankan negeri ini sebagai satu kesatuan, dengan berinteraksi dengan negara lain

dan memakmurkan rakyatnya dengan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini memiliki visi yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim ini merupakan gagasan yang dibuat untuk mewujudkan sebuah kemajuan bagi negara dengan cara membangun konektivitas antar pulau, industri perkapalan dan perikanan yang maju, transportasi laut yang maju, dan keamanan maritim yang kuat.

Kemudian, secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua besar, yaitu Benua Asia di sebelah Barat Laut dan Benua Australia di sebelah Tenggara. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudera Hindia di sebelah Barat dan Selatan dan Samudra Pasifik di sebelah Timur Laut. Hal ini memberikan korelasi dengan semangat yang sama lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang tertuang dalam konsideran menimbang bahwa tujuan undang-undang ini adalah dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan terhadap eksistensi dan keutuhan negara Indonesia sudah sering kita hadapi mulai dari permasalahan dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal), salah satu bentuk permasalahannya adalah keragaman masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat akan budaya, pelanggaran dan pengakuan wilayah NKRI oleh negara lain. Paling tidak kasus hilangnya sipadan dan ligitan menjadi pelajaran bahwa

arsip akan diposisikan bukan hanya *de jure* (merujuk pada pengakuan resmi menurut hukum dan norma-norma internasional) tetapi aspek *de facto* (merujuk pada situasi atau keadaan yang ada dalam kenyataan) mengukuhkan bahwa berdasarkan pertimbangan *effectivity* bahwa negara lain telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an.

Dalam konteks ini, tindakan administratif merupakan perwujudan dari hadirnya negara di masyarakat dengan membangun wilayah tersebut, dan melakukan tindakan administratif (salah satu contohnya mengeluarkan bukti pajak, kartu tanda penduduk) yang dibuktikan melalui arsip yang tercipta. Hal ini sejalan pula dengan semangat dibentuknya undang-undang kearsipan sebagai mana tercantum dalam risalahnya bahwa dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, arsip adalah bagian dari identitas bangsa yang berguna sebagai saranapenyelamatan wilayah negara. Konflik-konflik perbatasan wilayah dengan negara tetangga, dapat dihindari manakala kita memiliki data yang akurat dan sistem kearsipan yang baik. Khususnya dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan pemerintahan. Kasus pulau sipadan dan ligitan saat ini persoalan blok ambalat, semakin menyadarkan kita betapa kita harus lebih serius lagi mendatabatas-batas kewilayahan Negara dan menyelamatkan arsip yang berkaitan dengan kewilayahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Didasari cinta terhadap eksistensi dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia maka terbentuklah suatu istilah yang lahir dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang disebut sebagai arsip terjaga, yang diartikan sebagai arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

1. Pengaturan tentang Arsip Terjaga

Pengelolaan arsip terjaga tercantum jelas dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa Negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategi. Pengaturan ini kemudian diuraikan dan diamanatkan kembali melalui Pasal 43 bahwa Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI. Pemberkasan dan pelaporan wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kegiatan. Arsip yang tercipta pada lembaga negara, pemerintahan daerah, dan perguruan tinggi negeri yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) wajib diserahkan kepada ANRI dalam bentuk salinan autentik dari naskah asli paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan kepada ANRI. Terhadap ketentuan ini, terdapat amanat delegasi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberkasan dan pelaporan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala ANRI.

Jika kita lihat kembali lahirnya pengaturan arsip terjaga terlihat jelas bahwa ketentuan ini sangat terkait dengan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dikutip dalam pendapat akhir mini pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan untuk komisi II DPR RI pada tanggal 16 September 2009 yang tercantum dalam risalah rapat undang-undang kearsipan sebagai berikut: “beberapa hal penting dirasa perlu kami kemukakan di dalam sidang yang terhormat beberapa materi penting telah berhasil dibahas dan dirumuskan dalam rancangan Undang-Undang Kearsipan ini, antara lain:

Satu, penelusuran arsip-arsip yang memiliki nilai penting dan strategis bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip-arsip tentang kependudukan, kepulauan, dan pemerintahan perlu ditelusuri dengan serius sehingga dapat dikelola secara baik dan benar. Tugas penting tersebut selanjutnya menjadi amanat undang-undang kepada lembaga kearsipan khususnya arsip nasional Republik Indonesia.

Dua, arsip-arsip dan kepulauan yang secara nyata merupakan bukti autentik dalam mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselamatkan dan ditangani oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan profesionalitas sehingga hal tersebut dipercayakan tanggungjawabnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Ketiga, arsip perjanjian internasional yang merupakan salah satu bukti yang mewujudkan eksistensi kita kepada komunikasi antar bangsa perlu diberi perhatian lebih agar dapat dipelihara dan diselamatkan serta hal-hal lain dalam dunia kearsipan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang telah dengan serius dan penuh kemapanan dibahas, dirumuskan dalam rangkaian pembahasan undang-undang ini.

Ketentuan arsip terjaga juga diatur dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa Pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD wajib:

a. memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga; dan

b. memberkaskan dan melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga kepada Kepala ANRI paling lama 1

(satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan.

Kemudian berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah ditetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga. Dalam Peraturan ini telah diuraikan jenis arsip terjaga sebagai berikut:

Arsip Kependudukan, meliputi database kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), arsip tentang penetapan parameter pengendalian penduduk, arsip tentang administrasi dan demografi kependudukan di wilayah perbatasan dan kepulauan terdepan, serta arsip tentang status kewarganegaraan (naturalisasi).

Arsip Kewilayahan, meliputi: arsip tentang dasar penetapan wilayah NKRI, arsip tentang pengakuan dunia internasional mengenai batas wilayah NKRI, arsip tentang batas perairan Indonesia, serta arsip tentang tata ruang laut nasional dan perairan yuridiksi.

Arsip Kepulauan, meliputi arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau, arsip tentang luas dan besarnya kepulauan, arsip tentang jumlah pulau-pulau terdepan Indonesia, berikut administrasi kependudukannya, serta arsip tentang pulau-pulau

yang berbatasan langsung antara wilayah NKRI dengan negara lain.

Arsip Perbatasan, meliputi arsip tentang kawasan perbatasan dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 kawasan perbatasan, yaitu 3 kawasan perbatasan darat (Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini) dan 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar, arsip tentang batas wilayah negara yang meliputi batas darat dengan 3 negara (Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini), batas laut teritorial dengan 4 negara (Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste), serta batas laut yurisdiksi (*Zone Economic Exclusive/ZEE* dan landasan kontinen) dengan 9 negara, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, India, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Arsip Perjanjian Internasional, meliputi arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional dari lembaga pemrakarsa, arsip tentang proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar Negeri, arsip tentang proses pembuatan perjanjian internasional, mulai *draft*, *counterdraft* dan *draft final* sampai dengan pengajuan permohonan *full power* dari perjanjian internasional, arsip tentang pertukaran nota diplomasi, dan arsip tentang ratifikasi perjanjian internasional.

Arsip Kontrak Karya, meliputi arsip tentang perjanjian usaha pertambangan, arsip tentang perjanjian usaha ketenagalistrikan

untuk kepentingan umum, arsip tentang perjanjian kontrak bagi hasil perusahaan minyak dan gas bumi, arsip tentang perjanjian izin usaha pemanfaatan hutan.

Arsip Masalah-masalah Pemerintahan yang Strategis, meliputi arsip tentang Hasil dan Penetapan Pemilu Presiden, arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga tinggi Negara, arsip tentang kebijakan pengembangan pertahanan negara, arsip tentang operasi militer, arsip tentang intelijen dan pengamanan, arsip tentang pengembangan sarana alat utama sistem pertahanan (alutsista), arsip tentang ketersediaan ketahanan dan kerawanan pangan nasional, arsip tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) khususnya hak cipta, arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur nasional, arsip tentang regulasi atau deregulasi penanaman modal dan investasi.

2. Mengelola Arsip Terjaga dalam rangka Menjaga Keutuhan NKRI

Arsip Terjaga merupakan arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

ketentuan pengelolaan memang diberikan kepada lembaga pencipta arsip dalam memelihara, melindungi, dan

menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga, dan memberkaskan serta melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga kepada Kepala ANRI paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin hak keperdataan rakyat dan memberikan kepastian hadirnya negara dalam melayani rakyatnya, arsip membuktikan hal itu. Implementasinya jika kita kaitkan dengan posisi geopolitik Indonesia bahwa suatu negara membutuhkan geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional, hal ini didasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan, mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang Wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebhinekaan di Indonesia.

Wawasan nusantara dan cara pandang tersebut dapat dipelajari dan digali dari arsip yang dikelola dengan baik sehingga bisa diakses kepada publik guna menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dimulai dengan bagaimana pengelolaan arsip terjaga oleh pencipta arsip yang kemudian salinan autentiknya disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, maka disana pula kita bertekad menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena NKRI harga mati. ■

Gerimis Senja Hari

Oleh: Farhah Faridah

Pagi ini cuaca sangat cerah. Langit bersih tanpa polusi. Bersyukur sekali tinggal di Bogor setelah sebelumnya kudengar berita polusi di Jakarta. Langit Jakarta penuh polusi. Kulangkahkan kakiku menuju ruang kerjaku. Ruang kerja yang nyaman di sebuah direktorat instansiku. Ada satu ruang cukup besar berisi ruang tamu dan dua set meja dilengkapi komputer diseberang ruang tamu. Ada Dhella dan Tomy rekan kerjaku menempati ruang tersebut. Kemudian, tak jauh dari ruang pertama dan hanya dibatasi sekat adalah ruang kerjaku. Sendiri dilengkapi beberapa *filing cabinet*, satu set meja kerja dilengkapi komputer. Ada ruang kecil dibelakang ruang kerjaku dibatasi sekat gipsium, difungsikan sebagai dapur bersih. Hanya ada kulkas ukuran sedang dan dispenser, dan mini *kitchen set* berisi 3 lusin cangkir, 2 set stoples gula, kopi, teh, gelas kaki, dan lainnya untuk keperluan minum teh, kopi, dan minuman dingin. Satu ruang lagi adalah ruang direktur dan kasubdit dibatasi sekat gipsium, dilengkapi ruang rapat terbatas untuk maksimal 8 orang.

Aku membuka pintu ruangan. Senyum Dhella dan Tomy yang sudah datang lebih dulu mengembang. Aku juga tersenyum. Kulihat *smart watch* menunjukkan pukul 07.40.

"Pagi, Mbak Dhella dan Mas Tomy!" sapaku pada mereka.

"Pagi, Bu Vina." balas mereka. "Aman, ya, kita hari ini. Setidaknya bisa pulang *on time*." lanjut Tomy dengan senyumnya yang masih mengembang.

"Maksudmu, karena hari ini sampai 3 hari ke depan tidak ada Boss, ya?" tebak Dhella.

"Hahahaha.... *Exactly*. Biasanya banyak tamu, dan salah satu dari kita akan pulang telat diminta ikut rapat. Bergantian." jawab Tomy.

"Meskipun begitu, masing-masing ada tugas yang harus diselesaikan. Saya harus menyelesaikan beberapa *draft* MoU dalam Bahasa Inggris, dan teknis prosesnya. Sudah diagendakan penandatanganan MoU." kata Dhella, mulai fokus di depan komputer.

"*Yup*. Banyak disposisi surat yang harus distribusi dan pantau, beberapa ke Bu Vina untuk membuat *draft* balasan surat." kata Tomy. Tomy sekaligus operator sistem persuratan.

"Siap. Saya berencana dalam 3 hari ini mengimplementasikan hasil pelatihan kearsipan yang sudah saya ikuti selama 3 hari pada minggu lalu, memberkaskan arsip aktif sesuai kaidah kearsipan yang berlaku di kantor ini." ucapku menimpali.

Dhella dan Tomy berpandangan. "Memang selama ini penyimpanan arsip kantor kita salah?" tanya Dhella.

"*Banget*." kataku minyimpan tas, minum beberapa teguk, dan mulai sibuk memilah-milah dokumen dalam map yang bertumpuk di mejaku. Kuberkaskan sesuai masalahnya. Kurasakan tidak terlalu sulit, karena direktorat ini tugas pokok dan fungsinya adalah menginisiasi kerja sama dalam dan luar negeri, serta

mengkoordinasi kerja sama instansiku dalam satu pintu. Arsip yang tercipta adalah sebagian besar *Memorandum of Understanding* (MoU), Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang merupakan implementasi dari MoU sebagai payungnya, arsip kepegawaian, arsip keuangan, kegiatan workshop, dan surat menyurat lainnya yang akan kuberkaskan sesuai masalahnya.

"Pengarsipan yang benar itu seperti apa, Bu Vina?" tanya Dhella di sela-sela kesibukannya membuat *draft* MoU.

Aku menghentikan sejenak kegiatan pemberkasan. Menoleh ke arah Dhella yang sedang menunggu jawabanku. Tomy ikut serius menimpali. "*Share, dong*, hasil pelatihan kearsipannya!" katanya ikut menunggu dan menghentikan sejenak pekerjaannya.

"Sabar. Nanti kujelaskan dari awal pengelolaan arsip aktif. Sekarang kita bekerja masing-masing dulu. Biar kuselesaikan pemberkasan ini, mumpung tidak ada kegiatan lain. *Okay!*" kataku.

"Siap. Setuju. Besok saja, Bu Vina. Sekarang banyak yang harus kuselesaikan." kata Tomy. "Mbak Dhella, *gimana?*" tanya Tomy.

"Sepakat. Besok siang saja. Aku juga sedang *deadline* nih, MoU dan SPK yang sudah jalan koordinasi dengan mitra." Dhella mengacungkan jempolnya ke arahku.

Aku tersenyum. "Oke. Sepakat. Mudah-mudahan selesai dan siap presentasi besok siang." kataku melanjutkan pemberkasan.

Menjelang makan siang, sudah banyak berkas yang kuselesaikan berdasarkan klasifikasi instansiku. Baru tahu kalau instansiku memiliki klasifikasi. Setelah memilah-milah dokumen tadi pagi, kusempatkan kontak bagian tata usaha. Itulah awal aku mengetahui ternyata instansiku memiliki regulasi kearsipan berupa keputusan rektor 3 in 1. 3 in 1 artinya satu keputusan rektor

berisi tiga pedoman kearsipan yaitu klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Setelah membaca 3 in 1 ini barulah aku tahu kalau masa simpan arsip MoU itu rata-rata 3 sampai dengan 5 tahun disimpan pada unit kerja. Hal itu karena retensi aktif MoU dan SPK selama masih berlaku, dan masa berlaku MoU dan SPK bervariasi ada yang 3 dan 5 tahun. Setelah itu menjadi inaktif dan bisa dipindahkan ke *records center* pada bagian tata usaha. Selama ini, aku menyimpan arsip inaktif dalam tumpukan map tersebar di *container box* dan *filing cabinet* bertumpuk secara vertikal. Penyimpanan arsip aktif dan inaktif tercampur di ruang kerja. Aku belum mengetahui ilmu kearsipan saat itu. Kupandang tumpukan berkas yang sudah kuberikan indeks kata tangkap. Kurapikan pada meja kerjaku. Besok akan kulanjutkan membuat daftar arsip aktif dan menatanya dalam *filing cabinet* yang sudah kuberikan label nomor *filing cabinet* dan lacinya.

Keesokan harinya, kuselesaikan kegiatan pemberkasan. Mengejar waktu agar bisa selesai sebelum makan siang. Aku harus menepati janji untuk *sharing session* kepada Dhella dan Tomy. Sementara arsip inaktif kukumpulkan pada beberapa *container box*. Kusempatkan sepulang kantor kemarin membeli *container box* lagi, agar *filing cabinet* difungsikan untuk menyimpan arsip aktif saja. Arsip inaktif yang tersimpan pada *filing cabinet*, kupindahkan ke *container box*. Jika sudah sempat, akan kubuat daftar arsip inaktif yang dipindahkan dan dilakukan pemindahan arsip inaktif ke *records center*.

Siang itu aku segera menuju ruang kerjaku diikuti Dhella dan Tomy. "Baik. Ini adalah hasil pemberkasan arsip kantor kita telah tertata dalam 3 *filing cabinet*." kataku menunjukkan hasil pemberkasan yang sudah kukerjakan. "Pemberkasan ini disertai juga daftar arsip aktifnya sebagai sarana temu kembali arsip." kataku menambahkan penjelasan.

"Wah, lebih rapi dari sebelumnya yang bertumpuk." kata Tomy.

"Iya, dilengkapi nama file di kanan atas." Dhella menunjuk pada *tab* folder arsip.

"Pemberkasan arsip ini dilengkapi indeks sebagai kata tangkap. Fungsinya untuk membedakan arsip satu dengan yang lainnya. Kemudian, 3 *filing cabinet* ini sudah kuberikan label. Ada FC-1, FC-2, FC-3 pada tengah atas *filing cabinet*. Artinya *filing cabinet* 1, *filing cabinet* 2, dan seterusnya." kataku menunjukkan letak label pada *filing cabinet*.

"Biar kutebak selanjutnya." Tomy menyela. "Ini ada label LC-1, LC-2, LC-3, dan LC-4 pada masing-masing *filing cabinet*. Itu artinya laci 1, laci 2, dan seterusnya, kan?"

"Tepat." kataku menjawab ketidakyakinan Tomy. "Pada FC-1, saya mengelompokkan kegiatan berdasarkan masalah yang sama, antara lain workshop, proses administrasi mahasiswa asing, kepegawaian, dan kegiatan lainnya kantor kita. Lalu, FC-2 disusun secara abjad, berisi MoU dan SPK dalam negeri, dan FC-3 berisi MoU dan SPK luar negeri. Ini daftar arsip aktifnya jika kita ingin mencari arsip apa yang diperlukan."

"Wah, rapih ini FC-2. Aceh, Provinsi, Aceh Barat, Kabupaten, Bali, Provinsi, dan seterusnya. Keren. Cocok lokasinya dengan yang ada di daftar arsip." Tomy mencocokkan daftar dan fisiknya.

"Intensitas kerja sama instansi kita terus meningkat. Penuh nanti *filing cabinet*." Dhella menyela.

"Kewajiban kita mengelola arsip aktifnya aja. Semua arsip ada retensinya. Ini pedomannya." kataku menunjukkan 3 in 1. "Ini yang sudah inaktif harus dibuat daftar arsipnya untuk dipindahkan ke *records center* pada bagian tata usaha. Prinsip arsip itu mengalir." kataku.

"Nanti di tata usaha numpuk, *dong*?" tanya Dhella.

"Prinsip arsip mengalir. Pada tata usaha dapat memusnahkan arsip yang berketerangan musnah di jadwal retensi

arsip. Kemudian yang berketerangan permanen diserahkan ke lembaga kearsipan perguruan tinggi." Aku mencoba menjelaskan.

"Mantap. Mantap hasil pelatihan kearsipan sudah diimplementasikan. Pasti Pak Dilan dan Pak Sadam senang kalau tiba kembali lusa di kantor kita." Tomy mengacungkan jempolnya. Dhella juga.

Aku tersenyum. Senang bisa mengimplementasikan hasil pelatihan kearsipan. Hari menuju sore. Kami bersiap pulang. Tiba-tiba serentak kami saling berpandangan tanpa dikomando. Kami baru saja membaca pesan *whatsapp group* masuk. Wajah cerah kami sekejap berubah mendung. Tak sanggup membaca pesan Pak Sadam, Kasubdit kami. Gerimis air mata jatuh pada wajahku di senja hari ini. Juga pada wajah Dhella. Sementara mata Tomy berkaca-kaca.

"*Innalillahi wa innailaihi rojuun*. Telah meninggal dunia Prof. Dr. Dilan Kastela pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, pukul 15.15 WIB, di RSUP Kariadi, Semarang. Almarhum tidak sakit, wafat dalam rangka tugas di Semarang, sekaligus untuk menemui ibunya yang juga tinggal di Kota Semarang." Pesan pertama *whatsapp* kubaca.

"Ibu Vina, Mbak Dhella, dan Mas Tomy, sore ini ke rumah duka di Bogor, membantu persiapan pemakaman. Kami sedang usahakan penerbangan malam ini membawa jenazah. Rencana besok pagi dimakamkan." Pesan *whatsapp* yang kedua dari Pak Sadam.

Kami bergegas ke luar kantor dengan tujuan yang sama. Berangkat sendiri-sendiri, kami masing-masing membawa kendaraan. Langit mendung Bogor senja hari di Bulan September diiringi gerimis air matak. Kenangan dan kebaikan Pak Dilan selalu mendukung stafnya terus melintas. Semoga *husnul khatimah*. ■



Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Kemenlu Siti Nugraha Maulidia (kiri) menyerahkan Sertifikat Ingatan Kolektif Dunia kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan). (26/07/23).

KEMENLU RI SERAHKAN SERTIFIKAT INGATAN KOLEKTIF DUNIA

Jakarta (26/07) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan seminar internasional dengan tema Indonesian Documentary Heritages: Recalling The First NAM, To Build The World Anew and Hikayat Aceh as Memory of the World dan International Seminar on ASEAN's Formation Archives di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, ANRI. Pada kegiatan tersebut juga ditampilkan kilas balik nominasi dan dilaksanakan kegiatan serah terima Sertifikat *Memory of the World* (MOW) dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) kepada Komite MOW Indonesia.

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Kemenlu Siti Nugraha Maulidia menyampaikan bahwa program Ingatan Kolektif Dunia The

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bertujuan untuk memfasilitasi pelestarian dan akses ke warisan dokumenter dunia dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang warisan dokumenter dunia secara lebih luas.

Proses nominasi dilakukan bersama-sama, menunjukkan kolaborasi yang harmonis antara semua lembaga, organisasi, dan individu yang terkait, dan akan selalu diingat perannya dalam melestarikan warisan budaya dan sejarah kita. "Kita tidak boleh berpuas diri karena pencapaian ini bukanlah sebuah akhir, tapi justru ini adalah langkah awal kita bersama untuk menjaga nilai sejarah kita bagi generasi yang akan datang," terangnya.

Tiga sertifikat warisan dokumenter Indonesia yang diserahkan pada kesempatan tersebut telah ditetapkan sebagai Ingatan Kolektif Dunia pada Sidang ke-216 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada 10 hingga 24 Mei 2023. Ketiga arsip tersebut adalah Pidato Presiden Soekarno pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 1960 *To Build the World Anew*, Dokumentasi Pertemuan Pertama Gerakan Non Blok, dan Hikayat Aceh. Sertifikat-sertifikat tersebut menjadi pengakuan atas dedikasi dan kerja keras semua pihak yang terlibat. Siti Nugraha Maulidia menambahkan bahwa sertifikat-sertifikat ini juga memberikan kita tanggung jawab untuk menjaganya. "Kita telah diberi kesempatan untuk meningkatkan perawatan, pemulihan, dan penyebaran koleksi arsip kita," tutupnya. (tr)



Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, Kemnaker mendapatkan nilai yang relatif naik. Tetapi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan dari sektor pengawasan internal masih perlu peningkatan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, Kemnaker RI meluncurkan aplikasi pengawasan kearsipan internal Sistem Evaluasi Kearsipan Ketenagakerjaan (SEKAR). (27/07/23).

Humas Arsip Nasional RI © 2023

ANRI TERIMA ARSIP STATIS KEMNAKER TAHUN 1984 DAN 1986

Jakarta (27/07) - Pelaksana Harian Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto secara simbolik menerima penyerahan arsip statis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Anwar Sanusi berupa arsip video tahun 1984 dan 1986 yang telah dialihmediakan pada rangkaian acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemnaker di Ruang Serbaguna Tridharma. Acara ini digelar dengan tema “Gerakan Kearsipan di Era Digital: Jadikan Arsip Sebagai Bukti Kinerja”.

Imam Gunarto menegaskan posisi transformasi kearsipan sebagai

backbone transformasi digital pemerintahan termasuk di bidang ketenagakerjaan. Namun dalam hal tertentu memang masih terdapat beberapa kekhususan, misalnya dalam hal penganggaran yang diajukan kepada Kementerian Keuangan yang harus menggunakan tanda tangan basah, atau terkait dengan penegakan hukum yang dalam prosesnya masih dibutuhkan arsip konvensional (non-digital). Meski demikian, semangat kearsipan digital harus selalu kita kuatkan.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, Kemnaker mendapatkan nilai yang relatif naik. Tetapi Menteri

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan dari sektor pengawasan internal masih perlu peningkatan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, Kemnaker RI meluncurkan aplikasi pengawasan kearsipan internal Sistem Evaluasi Kearsipan Ketenagakerjaan (SEKAR).

Pada acara ini pun turut digelar pemberian penghargaan kepada arsiparis teladan, pengelola arsip berdedikasi, unit kerja dengan pengawasan kearsipan terbaik, dan unit kerja teraktif dalam penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kemnaker RI. **(md/ws)**



FOTO: DOK. ANRI

Workshop diisi agenda pembahasan finalisasi formulir nominasi dan bukti pendukung serta pemberian rekomendasi Kelompok Kerja kepada Dewan Eksekutif SARBICA dan Sekretariat Jenderal ASEAN. (27/07/23).

WORKSHOP DISKUSI KERJA SARBICA: NOMINASI ARSIP FORMASI ASEAN UNTUK INSKRIPSI REGISTRASI MOWCAP

Jakarta (27/07) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan kegiatan *workshop* Diskusi Kerja Southeast Asia Regional Branch of the International Council on Archives (SARBICA) untuk Penominasian Arsip Formasi ASEAN ke Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) di Ruang Sadewa, Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Konservasi ANRI, Kandar, Wakil Ketua MOWCAP Vu Tinh Minh Huong, dan diikuti secara langsung oleh perwakilan tiga negara anggota ASEAN (Filipina, Singapura, Malaysia), serta perwakilan Kementerian Luar Negeri RI. Adapun secara daring, diikuti empat negara anggota ASEAN, di antaranya Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar.

Workshop diisi agenda pembahasan finalisasi formulir

nominasi dan bukti pendukung serta pemberian rekomendasi Kelompok Kerja kepada Dewan Eksekutif SARBICA dan Sekretariat Jenderal ASEAN. Dalam kesempatan tersebut, Kandar menyampaikan bahwa kegiatan utama di dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan penominasian arsip formasi ASEAN untuk inskripsi pada registrasi MOWCAP. “Dengan mengambil penilaian dan masukan dari para ahli, kita harus dapat segera mengajukan nominasi ini selambat-lambatnya pada 15 September 2023,” terangnya.

Sementara itu, Vu Tinh Minh Huong menyampaikan bahwa penominasian, persiapan, dan kriteria yang akan dimasukkan ke dalam registrasi MOW dan MOWCAP harus lebih detail. Hal ini karena adanya kepentingan arsip yang akan diajukan secara internasional dan kita bisa memilih arsip mana saja yang akan ditampilkan. “ASEAN

menjadi organisasi yang penting secara internasional, di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang arsipnya bisa dimasukkan ke dalam MOWCAP dan MOW, sehingga ada alasan-alasan yang sangat istimewa di dalamnya,” tambahnya.

Adapun hasil rekomendasi pada kegiatan ini di antaranya:

- Memilih nama atau judul nominasi yang singkat dan padat, dengan memasukkan kebijakan, strategi, dan alasannya;
- Kelompok kerja membutuhkan surat pendukung pengajuan nominasi, maka bagi negara yang tanpa arsipnya seperti Kamboja harus mengirimkan surat persetujuan penominasian dokumen ASEAN ke MOWCAP atau MOW;
- Deklarasi Bangkok sebagai dokumen utama, di mana lima negara pendiri dan sekretariat ASEAN beserta negara anggota lainnya (Brunei Darussalam, Laos, Kamboja dan Myanmar) akan mempersiapkan dokumennya. Sekretariat ASEAN akan menyampaikan dokumen pendukung;
- Tenggat waktu pengisian pengajuan nominasi tanggal 11 Agustus 2023;
- Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja yang ketiga diadakan tanggal 15 Agustus 2023;
- Kelompok Kerja akan mengadakan SARBICA Executive Board Special Meeting untuk membahas penominasian setelah Pertemuan Kelompok Kerja ketiga;
- Indonesia mengajukan Focus Group Discussion (FGD) secara daring untuk membahas nominasi yang disampaikan negara anggota SARBICA untuk memperkaya poin penting penominasian di masa mendatang. **(tr)**



Diskusi dihadiri oleh Ketua KPK Periode 2011-2015, Abraham Samad, Arsiparis Madya ANRI, Widhi Setyo Putro dan dipandu oleh Arsiparis Ahli Madya, Retno Wulandari sebagai moderator. (23/08/23).

ANRI SELENGGARAKAN DISKUSI PUBLIK “INDONESIA MERDEKA DARI KORUPSI: ARSIP KORUPSI ERA REPUBLIK”

Jakarta (23/08) - Sebagai upaya untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari korupsi yang telah melanda Indonesia selama beberapa dekade, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Indonesia Merdeka Dari Korupsi: Arsip Korupsi Era Republik” secara daring dan ditayangkan melalui kanal Youtube Arsip Nasional RI. Pada diskusi ini turut hadir Deputi Konservasi ANRI, Kandar, Ketua KPK Periode 2011-2015, Abraham Samad, Arsiparis Madya ANRI, Widhi Setyo Putro, dan Direktur Layanan dan Pemanfaatan, Eli Ruliawati.

Dalam sambutannya, Deputi Konservasi ANRI, Kandar mengungkapkan bahwa korupsi hanya

dipandang di lingkungan aparatur. “Pandangan korupsi hanya dipandang di lingkungan aparatur saja dan masyarakat tidak sadar kalau kita juga terlibat di dalamnya. Melalui diskusi ini, ANRI berupaya terus berperan untuk menyukseskan agenda pemerintah,” terang Kandar.

Pada diskusi ini, Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad menjelaskan secara rinci tentang korupsi, meliputi dampak, klasifikasi, cara memerangi dan melawan korupsi, cara efektif memberantas korupsi, hingga strategi pemberantasan korupsi.

“Posisi di Indonesia saat ini, sangat memprihatinkan. Kita bisa melihat di data bahwa tingkat korupsi kita tidak menurun ada kecenderungan naik. Melihat bahwa indeks persepsi

korupsi kita turun ke 34 dari 38 tahun 2022. Ini sebuah sejarah yang paling memprihatinkan,” papar Abraham Samad.

Sementara itu, Arsiparis Madya ANRI, Widhi Setyo Putro menyampaikan bahwa arsip korupsi tidak semata-mata tentang mengumbarkan keserakahan, kerakusan namun juga tentang keadilan. Terkait bagaimana usaha masyarakat dengan integritas sebagai usaha dalam memberantas korupsi. Diskusi ini diharapkan akan menjadi titik awal untuk gerakan yang lebih besar dalam melawan korupsi di Indonesia dan langkah-langkah konkret akan diambil untuk mengungkapkan arsip korupsi era republik, guna memastikan keadilan dan pembelajaran bagi generasi mendatang. **(ba)**



FOTO: DOK ANRI

Seminar dilaksanakan secara luring dan ditayangkan secara daring melalui Youtube Arsip Nasional RI yang bertujuan untuk menjadi wadah diskusi di kalangan akademisi dan masyarakat mengenai sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Meksiko. (24/08/23).

SEMINAR INTERNASIONAL PANORAMA 70 TAHUN PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA INDONESIA - MEKSIKO

Jakarta (24/08) - Dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Meksiko, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Seminar Internasional dan Pameran Arsip dengan tema Panorama 70 Tahun Persahabatan dan Kerja Sama Indonesia - Meksiko di Gedung ANRI, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Pameran arsip diresmikan langsung oleh Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Armando Gonzalo Alvarez dan Plh. Kepala ANRI, Imam Gunarto, serta pada seminar internasional menghadirkan Duta Besar RI untuk Meksiko, Cheppy T. Wartono, serta Pakar Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie.

Plh. Kepala ANRI, Imam Gunarto dalam sambutannya menyampaikan,

acara pameran dan seminar menjadi wujud nyata bahwa kearsipan dapat berperan dalam hubungan diplomasi.

Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Armando Gonzalo Alvarez yang juga menjadi narasumber pada sambutannya menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, semangat kolaborasi Indonesia dan Meksiko semakin tercermin selama puncak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, serta selama masa kepresidenan Indonesia di G20 pada tahun 2022 yang tema-tema prioritasnya sangat didukung oleh Meksiko. Selain itu, dengan bantuan Indonesia, Meksiko diundang untuk menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN.

Seminar yang dilaksanakan secara luring dan ditayangkan secara daring

melalui Youtube Arsip Nasional RI ini bertujuan untuk menjadi wadah diskusi di kalangan akademisi dan masyarakat mengenai sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Meksiko. Diskusi ini diawali dengan memahami peran Presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno dan interaksinya dengan Presiden Meksiko saat itu, Adolfo Lopez Mateos.

Seminar ini diharapkan akan merefleksikan kemajuan yang telah didorong oleh kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral selama 7 (tujuh) dekade terakhir. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan wawasan terkait aspek budaya dan sosial dari hubungan yang setara antara Indonesia dan Meksiko. **(sa)**



Gedung berdiri diatas tanah seluas 1400 meter persegi dan akan dibangun setinggi 4 lantai yang akan digunakan untuk ruang kerja, ruang pengolahan arsip, ruang restorasi arsip dan ruang penyimpanan arsip. (07/09/23).

PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN GEDUNG DEPOT ARSIP BERKELANJUTAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Bandung (07/09) - Acara peletakan batu pertama sebagai awal dimulainya pembangunan gedung depot arsip berkelanjutan di Bandung, Jawa Barat dilaksanakan pada 7 September 2023. Acara ini dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani.

Pada laporan kegiatan yang disampaikan Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani disampaikan bahwa sesuai rencana yang telah ditetapkan, kegiatan pembangunan gedung arsip berkelanjutan ini sudah sesuai dengan standar depot dan standar gedung pemerintah serta sesuai dengan rencana tata kota pemerintah kota Bandung dan mengusung kearifan lokal daerah Jawa Barat dan berkonsep *green building*.

Gedung yang berdiri diatas tanah seluas 1400 meter persegi ini akan dibangun setinggi 4 lantai yang akan digunakan untuk ruang kerja, ruang pengolahan arsip, ruang restorasi arsip dan ruang penyimpanan arsip. Rini juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pihak Pemerintah Daerah Jawa Barat atas peran aktif dan partisipasinya yang telah menghibahkan tanah untuk dibangunnya gedung arsip berkelanjutan ini.

Sementara itu, Imam Gunarto berpesan kepada pihak pelaksana pembangunan untuk menjaga kualitas dan sesuai spesifikasinya dan harus yang premium, tidak boleh sembarangan dan dilanggar.

Puncak acara ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada area gedung yang akan dibangun Gedung Arsip Berkelanjutan. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Imam Gunarto, kemudian dilanjutkan dengan Rini Agustiani serta perwakilan pemerintah daerah setempat.

Pada acara peletakan batu pertama ini juga dihadiri perwakilan dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Camat dan Lurah. Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh rohaniawan dengan harapan agar pekerjaan pembangun gedung arsip berkelanjutan dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan sehingga dapat selesai sesuai rencana. **(Inh/ra)**



Warisan dokumenter yang siap didaftarkan pada registrasi MOW dan MOWCAP yaitu Arsip Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Arsip PT Semen Padang, Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian, dan Tambo Tuanku Imam Bonjol. (11/09/23).

EMPAT WARISAN DOKUMENTER INDONESIA MENUJU MOW DAN MOWCAP

Jakarta (11/09) - Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto membuka Rapat Dewan Pakar Komite Nasional Memory of the World (MOW) Indonesia, di Ruang Noerhadi Magetsari. Rapat tersebut membahas empat warisan dokumenter yang akan diajukan pada register MOW dan MOWCAP (Memory of the World Committee Asia Pasific), dihadiri oleh Dewan Pakar MOW antara lain, Mukhlis PaEni, Wardiman Djojonegoro, Mustari Irawan, Munawar Holil, Erwiza Erman, Dady P. Rachmananta, Rieke Diah Pitaloka, Asvi Warman Adam, dan Ali Akbar.

Warisan dokumenter yang siap didaftarkan pada registrasi MOW dan MOWCAP yaitu Arsip Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Arsip PT Semen Padang, Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian, dan Tambo Tuanku Imam Bonjol. Pada Rapat ini dewan pakar memberikan pendapat dan masukannya mengenai warisan dokumenter tersebut.

Ketua Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Itje Chodidjah menyampaikan akan mendukung penuh penominasian empat warisan dokumenter ini. Beliau juga

menyampaikan untuk penominasian ini harus segera disiapkan dan didaftarkan pada tanggal 13 September 2023 mendatang.

Dengan nominasi ini diharapkan warisan dokumenter yang memiliki nilai signifikansi dunia di Indonesia mendapatkan perhatian lebih dalam hal preservasi dan aksesnya. Hal ini demi terwujudnya kepedulian atas memori bangsa untuk generasi mendatang indonesia dan dunia. **(ben)**



Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto menyerahkan sertifikat Memory of the World (MoW) pidato Sukarno pada KTT GNB di Beograd kepada Presiden ke-5 Republik Indonesia yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, dan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas. (12/09/23).

PRESIDEN KE-5 RI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI RESMIKAN PUSAT STUDI ARSIP PRESIDEN SUKARNO

Jakarta (12/09) - Presiden ke-5 Republik Indonesia yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarnoputri meresmikan dan menandatangani prasasti Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan yang di dalamnya terdapat Pameran Tetap Presiden Pertama RI Ir. Sukarno di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jl. Gajah Mada No. 111, Jakarta Barat.

Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan dalam laporannya bahwa program Memori Kolektif Bangsa (MKB) dan Memory of the World (MoW) merupakan roh dari program arsip kepresidenan, maka dari itu program MKB dan MoW harus terus dikembangkan.

“Disamping program arsip kepresidenan, ANRI juga memiliki

program yang sangat terkait dan menjadi roh dari arsip kepresidenan, yaitu Program MKB dan MOW. Pengakuan dunia internasional akan prestasi bangsa Indonesia haruslah terus dikembangkan dari berbagai bidang, termasuk dari jalur diplomasi kebudayaan, melalui arsip dan naskah”, ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Megawati Soekarnoputri menceritakan pengalamannya saat menjadi delegasi termuda dalam KTT GNB di Beograd.

“pada saat itu umur saya 14 tahun. Saya diperbolehkan untuk jalan-jalan oleh Bapak (Presiden Ir. Sukarno), asalkan tetap memperhatikan pidato pada KTT GNB di Beograd”, tuturnya.

Ia pun menambahkan bahwa karena arsip tersebut sudah menjadi MoW, maka semua orang boleh

menggunakan pidato tersebut sebagai pembelajaran.

Sebagai informasi gedung Pusat Studi Arsip Presiden Pertama RI Ir. Sukarno terdiri dari empat hall yang menampilkan pameran tetap arsip Sukarno sebagai Bapak Bangsa Indonesia, yaitu:

- Hall 1 Aku Indonesia (kisah Sukarno dari lahir hingga berpulang)
- Hall 2 Jalan Politik (perjuangan dan dedikasi politik)
- Hall 3 Patron Budaya (estetika dan peradaban)
- Hall 4 Kesejahteraan dan Kerakyatan (ekonomi dan kemandirian)

Gedung tersebut merupakan fasilitas edukasi yang dapat dikunjungi oleh pelajar, mahasiswa, sampai masyarakat umum. (rnz)



FOTO: DOK. ANRI

Seminar bertujuan untuk memaksimalkan potensi arsip sebagai bahan ingatan, pengetahuan dan pembelajaran bagi bangsa dan negara, khususnya menyangkut aspek geopolitik yang dapat menggambarkan posisi Indonesia di mata dunia. (30/09/23).

PERINGATAN KE-63 PIDATO PRESIDEN SUKARNO DI MAJELIS UMUM PBB "TO BUILD THE WORLD ANEW"

Jakarta (30/09) - Memperingati Pidato Presiden Sukarno di Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 30 September 1960, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Peringatan ke-63 Pidato Presiden Sukarno di Majelis Umum PBB "To Build the World Anew" dan Relevansinya terhadap Peta Geopolitik saat ini. Kegiatan dalam bentuk seminar ini dilaksanakan di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan ANRI, jalan Gajah Mada, no. 111 Jakarta Barat. Pada acara yang digelar secara daring dan luring turut hadir Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto, yang memberikan sambutan dan membuka acara, Pakar Geopolitik, Hasto Kristiyanto, sebagai pembicara kunci, dan para narasumber antara lain Pakar Kemaritiman dan Pertahanan sekaligus Dewan Pakar Kemaritiman ANRI, Connie Rahakundini Bakrie, Ketua Dewan Pakar *Memory of the World* Indonesia, Mukhlis Paeni, Pakar Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah, dan Pakar Ketahanan Nasional, Mayjen. TNI (Purn.) Lumban Sianipar.

Imam Gunarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pidato Presiden Sukarno pada momen tersebut sangat monumental di dunia internasional dan menjadi pondasi politik kebangsaan serta politik luar negeri Indonesia. "Berdasarkan arsip resmi PBB dan arsip autentik yang tersimpan di ANRI, 63 tahun lalu, tepat pada hari Jumat, 30 September 1960, menjelang pukul 3 sore, Presiden Sukarno bersama delegasi memasuki ruangan sidang umum PBB ke-15, pada *plenary meeting* ke-880, untuk menyampaikan pidato yang sangat monumental. Saat itu detik-detik bersejarah

tentang geopolitik Indonesia terpatikan dalam monumen pemikiran internasional yang kemudian menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun politik luar negeri dan politik kebangsaan Indonesia," terang Imam Gunarto. Ditambahkan olehnya, pidato Presiden Sukarno yang berdurasi 122 menit telah memberikan inspirasi bagi seluruh peserta sidang yang merupakan perwakilan pimpinan dunia yang hadir pada saat itu untuk mendirikan gerakan nonblok untuk dunia yang lebih baik. Imam Gunarto menyampaikan bahwa pidato monumental ini yang menjadi arsip bersejarah telah diakui sebagai *Memory of the World* UNESCO pada 24 Mei 2023 dan menjadi warisan yang menginspirasi dunia.

Pada kesempatan yang sama, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa pidato "*To Build the World Anew*" merupakan esensi dari harapan dan mimpi seluruh bangsa-bangsa dunia yang mengalami penindasan dan penjajahan. "Dalam cara pandang Sukarno, dunia internasional pada waktu itu selalu diwarnai oleh peperangan, sehingga konsepsi dari pidato "*To Build the World Anew*" adalah realitas peradaban umat manusia se-dunia yang diwarnai oleh penindasan dan Indonesia selama 350 tahun mengalami makna kolonialisme dan imperialisme. Apa yang disampaikan Presiden Sukarno ternyata relevan sampai dengan saat ini bahwa di tengah pertarungan geopolitik itu jiwa kemanusiaan tetap berbicara," terang Hasto Kristiyanto. Selain itu, Hasto Kristiyanto juga menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Sukarno tidak hanya diperuntukan untuk

rakyat Indonesia, tetapi harus menjadi bagian dari perjuangan umat manusia se-dunia untuk bebas dari kolonialisme dan imperialisme serta menjadi bagian penting dari persaudaraan dunia. Ia menambahkan bahwa konsepsi utama dari pidato Presiden Sukarno adalah untuk memberikan perubahan progresif untuk lebih mengutamakan kemanusiaan pada PBB yang didirikan dalam nuansa konflik Perang Dunia ke-2 dan masih dalam pengaruh persaingan geopolitik negara-negara besar.

Seminar ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi arsip sebagai bahan ingatan, pengetahuan dan pembelajaran bagi bangsa dan negara, khususnya menyangkut aspek geopolitik yang dapat menggambarkan posisi Indonesia di mata dunia. Pembelajaran terhadap aspek geopolitik dapat didapatkan melalui arsip. Tidak hanya sebagai ingatan, arsip dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat dan pemangku kebijakan di Indonesia. Salah satu arsip yang masih sangat relevan dan bernilai kesejarahan bagi pembelajaran geopolitik yakni Arsip Pidato Presiden Sukarno pada Majelis Umum PBB pada 30 September 1960. Serta menjadi bagian dari desiminasi perolehan sertifikat *Memory of the World* dari UNESCO terhadap Pidato Presiden Sukarno di Majelis Umum PBB pada tahun 2023. Pidato 63 tahun silam akan dijadikan media pembelajaran yang jika didayagunakan akan berdampak bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan bahan rujukan bagi para pembangku kebijakan di Indonesia.

Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi antara ANRI melalui Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan dengan pakar geopolitik Indonesia, Hasto Kristiyanto. Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan ANRI mengelola Gedung Pameran Tetap Arsip Kepresidenan Pertama Ir. Sukarno. Sebagai informasi, penyelenggaraan pameran arsip statis sejalan dengan salah satu misi ANRI, yakni memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. (am)



FOTO: DOK. ANRI

ANRI memiliki program pengelolaan arsip bagi kementerian/lembaga yang akan dipindah ke ibu kota baru . (03/10/23).

PERSIAPAN PERPINDAHAN IKN, PLT. KEPALA ANRI TINJAU PENATAAN ARSIP KPK

Jakarta (03/10) - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto meninjau secara langsung penataan arsip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, 3 Oktober 2023. Tinjauan tersebut dalam rangka persiapan perpindahan KPK ke Ibu Kota Negara baru.

Menurut Imam Gunarto, kebijakan penataan arsip kementerian/lembaga yang akan pindah, khususnya dalam hal ini KPK merupakan momentum yang sangat penting agar arsip-arsip yang ada ini dapat dikelola dan tertata dengan baik.

“Ketika satu kementerian lembaga akan pindah itu, yang tidak biasa diperhatikan arsipnya. Nah, oleh karena itu, kami dari Arsip Nasional mengingatkan kepada seluruh kementerian/lembaga agar ketika pindah, arsipnya beres dulu,” ujar Imam Gunarto.

Imam menambahkan setelah dilakukan penataan arsip, selanjutnya akan dilakukan digitalisasi arsip. “Kami nanti berharap, arsip-arsip ini ditata, kemudian didigitalkan dan KPK bisa mengaksesnya untuk pelaksanaan administrasi dari ibu kota negara. Arsipnya tetap di Jakarta, tetapi bisa digunakan dari mana-mana,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyambut baik dan mengucapkan terima kasih dengan adanya kebijakan penataan arsip ini dan siap berkolaborasi serta bersinergi untuk pembenahan dan penataan arsip.

“Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih dan syukur Alhamdulillah teman-teman ANRI telah mendampingi KPK dalam proses manajemen arsip supaya kita ketika akan pindah ke IKN, arsip-arsip yang ada di kantor

itu kemudian bisa terjaga, terjamin keberadaannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nurul Ghufron menambahkan bahwa dengan arsip yang tertata dengan rapi setidaknya dapat menghindari dari berbagai masalah. Sebaliknya, arsip yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Dengan arsip yang ditata dengan bagus, itu menunjukkan derajat administrasi ketatanegaraan sebuah bangsa,” ungkapnya.

Menurut Nurul Ghufron menyampaikan bahwa apabila data-data yang ada di kementerian/ lembaga dapat diintegrasikan dengan baik, maka pencegahan korupsi dapat dilakukan. “Kalau bangsa kita datanya sudah tertib, bisa dipadupadankan, maka saya yakin, separuh pekerjaan pemberantasan korupsi, utamanya pencegahan itu selesai,” terangnya.

Dalam rangka perpindahan IKN, pada tahun ini, ANRI memiliki program pengelolaan arsip bagi kementerian/ lembaga yang akan dipindah ke ibu kota baru. Program pengelolaan arsip tersebut meliputi penataan dan penyelamatan arsip yang bernilai guna bagi kegiatan administrasi pemerintah maupun yang bersifat statis sebelum dipindahkan ke Ibu Kota baru.

Melalui program penataan arsip kementerian/Lembaga dalam menghadapi persiapan pemindahan IKN ini, diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dapat menjaga dan melestarikan peradaban dan sejarah perjalanan bangsa secara utuh, terpercaya dan komprehensif. (is)



FOTO: DOK. ANRI

Program KSST di Bidang Kearsipan 2023 diikuti oleh peserta dari 7 (tujuh) negara di antaranya Kamboja, Filipina, Laos, Vietnam, Timor Leste, Papua Nugini dan Fiji. (16/10/23).

PLT. KEPALA BUKA PROGRAM KSST DI BIDANG KEARSIPAN 2023 KOLABORASI ANRI, KEMENSETNEG DAN KOICA

Yogyakarta (16/10) - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia membuka Program Kerja Sama Selatan – Selatan dan Triangular (KSST) di Bidang Kearsipan/South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Archives and Records 2023 yang dilaksanakan dalam bentuk *Training on Records for South-South Countries*. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara ANRI, Kementerian

Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensekneg) dan Korean International Cooperation Agency (KOICA).

Program KSST di Bidang Kearsipan 2023 diikuti oleh peserta dari 7 (tujuh) negara di antaranya Kamboja, Filipina, Laos, Vietnam, Timor Leste, Papua Nugini dan Fiji. Kegiatan yang berlangsung selama 2 minggu ini

bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan di negara-negara target KSST melalui *sharing knowledge* tentang digitalisasi arsip yang dilakukan di Indonesia dan Korea kepada para peserta. Selain kegiatan belajar mengajar, peserta KSST juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke lembaga kearsipan dan kebudayaan serta destinasi wisata di Yogyakarta. **(agp)**



FOTO: DOK. ANRI

Kegiatan serah terima merupakan bentuk dukungan dalam rangka membangun memori kolektif kedua bangsa yang memiliki hubungan sejarah di masa lalu. (27/10/23).

SERAH TERIMA SALINAN DIGITAL ARSIP STATIS TENTANG HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - IRAK

Jakarta (27/10) - Pelaksana Tugas (Plt.) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Head of Mission, Embassy of the Republic of Iraq, Dr. Ammar Hameed Saadallah Al Khalidy melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Salinan

Digital Arsip Statis tentang Hubungan Bilateral Indonesia – Irak. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dalam rangka membangun memori kolektif kedua bangsa yang memiliki hubungan sejarah di masa lalu. Kegiatan ini disaksikan oleh Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Timur Tengah yang hadir secara daring.

Adapun salinan digital arsip statis yang diserahkan meliputi arsip tentang peran Delegasi Irak dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, pertandingan bola basket persahabatan tim Indonesia dan Irak pada 1966, dan arsip lain yang berkaitan dengan hubungan diplomatik Indonesia – Irak. Dalam sambutannya Plt. Kepala ANRI menyampaikan bahwa ANRI dan Library and Archives of the Republic Iraq memiliki visi yang sama khususnya dalam rangka pelestarian arsip tentang sejarah peradaban Islam yang sangat penting dalam pembangunan identitas kedua bangsa. **(agp)**



Seminar diisi dengan diskusi panel yang dimoderatori Arsiparis Madya selaku Ketua Tim Penyimpanan Arsip, Achmad Dedi Faozi yang juga menjabat Executive Council Member of SEAPAVAA Senior Archivist of ANRI. (06/11/23).

ANRI GELAR SEMINAR INTERNASIONAL AUDIOVISUAL ARCHIVES PRESERVATION STRATEGIES

Jakarta (06/11) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Seminar Internasional *Audiovisual Archives Preservation Strategies secara hybrid* di Ruang Noerhadi Magetsari, Gedung C, Lantai 3, ANRI dan secara daring melalui zoom meeting serta kanal Youtube Arsip Nasional RI. Acara dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, Imam Gunarto dan turut hadir Presiden Southeast Asia – Pacific Audio Visual Archive Association (SEAPAVAA), Karen Chan.

Pada seminar dilaksanakan diskusi panel yang dimoderatori Arsiparis Madya selaku Ketua Tim Penyimpanan Arsip, Achmad Dedi Faozi yang juga menjabat Executive Council Member of SEAPAVAA Senior Archivist of ANRI. Pada sesi ini melibatkan 4 (empat) pembicara terkemuka dalam bidang preservasi, yaitu Kepala Departemen Pelestarian Media pada Layanan Pelestarian Universitas Illinois di Urbana-Champaign USA, Joshua Harris, Kepala Pelestarian Koleksi Arsip Film dan Suara Nasional Australia,

Rebecca Coronel, Kepala Penelitian Pusat Studi Warisan Politeknik Universitas Filipina, Rosemarie Roque, Analis Pelestarian Digital Arsip Selandia Baru, Joshua Ng yang hadir langsung di ANRI.

Pada sesi diskusi ini membahas sejumlah topik menarik, seperti bagaimana cara Artificial Intelligence (AI) memproses dan mengelola arsip audiovisual, bagaimana peranan dari AI untuk memperbaiki performa kinerja kearsipan. Joshua Ng menjelaskan bahwa jika kita tidak memiliki metadata yang cukup untuk arsip-arsip analog, maka itu tugas dari AI untuk menyempurnakan data tersebut. Seperti ketika kita tidak bisa menemukan deskripsi yang tepat untuk arsip analog, maka AI yang akan menyempurnakan deskripsi arsip tersebut.

“Dengan adanya AI dapat meningkatkan kualitas dari arsip - arsip digital yang dalam file analog, dalam kondisi tidak baik. Tentu saja AI masih butuh pengembangan lebih lanjut untuk

mendapatkan kualitas yang diinginkan,” tambah Rosemarie Roque.

Terkait dengan memprioritaskan materi audiovisual, Joshua Harris menanggapi bahwa format dari khazanah arsip analog sudah usang dan harus melakukan preservasi. “Kita masih harus melakukan preservasi untuk khazanah arsip yang sudah usang tersebut. Karena pada dasarnya kita harus merawat dan melestarikan khazanah arsip tersebut sebagai bukti bahwa pertama kali arsip diciptakan memang seperti itu,” jelas Joshua Harris.

Sesi diskusi ditutup dengan ucapan terima kasih kepada semua pembicara yang hadir, baik secara luring maupun daring. Moderator menggarisbawahi pentingnya upaya pelestarian arsip untuk memastikan generasi mendatang dapat mengakses informasi dalam berbagai format, serta pentingnya upaya terus menerus dalam mengembangkan teknologi dan praktik terkini. **(rey)**



Arsip Statis Penanganan COVID-19 dari Kemenkes RI diterima oleh Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha disaksikan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. (09/11/23).

ANRI TERIMA PENYERAHAN ARSIP STATIS COVID-19 DARI KEMENKES RI

Jakarta (09/11) - Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rini Agustiani menerima Arsip Statis Penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Serah terima dilaksanakan pada rangkaian acara pembukaan Hari Kesehatan Nasional ke-59 dan disaksikan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin di Jakarta Convention Center, Jakarta pada 9 November 2023.

Arsip Statis Penanganan COVID-19 dari Kemenkes RI diterima oleh Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani

yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha disaksikan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

Arsip Statis Penanganan COVID-19 yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha ini terdiri dari 298 arsip tekstual, 70 arsip foto dan 20 arsip video yang berasal dari 8 unit organisasi yang ada di Kemenkes RI. Kemenkes RI telah menyerahkan arsip statis penanganan COVID-19 mulai tahun 2020 sampai saat ini sebanyak 5 kali.

Penyerahan arsip statis penanganan COVID-19 merupakan bentuk pelaksanaan amanah SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, hal ini juga bertujuan sebagai upaya penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, sehingga layak untuk disimpan dan dilestarikan di ANRI sebagai memori kolektif bangsa. **(nul)**

Sidang Dewan Pakar Komite MKB dan Komite Nasional MOW Indonesia

FOTO: DOK. ANRI



Komite Nasional MOW Indonesia melaksanakan pembahasan terhadap warisan dokumenter Indonesia yang memiliki signifikansi pada level internasional dengan menunjukkan *Universal Outstanding Value* yang dimiliki sebuah warisan dokumenter. (13/11/23).

ENAM WARISAN DOKUMENTER INDONESIA DINOMINASIKAN DALAM REGISTER MEMORY OF THE WORLD

Jakarta (13/11) - Sebanyak 6 (enam) warisan dokumenter Indonesia dibahas dalam sidang Dewan Pakar Komite Nasional *Memory of The World* (MOW) Indonesia yang berlangsung di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sidang ini untuk menentukan koleksi warisan dokumenter yang akan diajukan dalam register MOW, UNESCO. Sidang dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar, Mukhlis PaEni dan Ketua Komite Nasional MOW Indonesia sekaligus Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto. Turut hadir dalam sidang antara lain Menteri Pendidikan periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, Pakar Tradisi Lisan, Pudentia Maria

Purenti Sri Sunarti, Pakar Sejarah, Prof. Asvi Warman Adam dan Prof. Erwiza, perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Perpustakaan Nasional, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Enam warisan dokumenter Indonesia yang dinominasikan dalam register MOW, yaitu Arsip dan Surat-surat Kartini bekerja sama dengan Belanda, Arsip Pembentukan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bekerja sama dengan arsip nasional dari negara anggota ASEAN, Karya-karya Hamzah Fansuri bekerja sama dengan Malaysia,

Arsip dan Naskah Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari, Arsip Tari Khas Mangkunegaran, dan Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian.

Komite Nasional MOW Indonesia melaksanakan pembahasan terhadap warisan dokumenter Indonesia yang memiliki signifikansi pada level internasional dengan menunjukkan *Universal Outstanding Value* yang dimiliki sebuah warisan dokumenter. Program register MOW menjadi langkah konkret dalam upaya melestarikan dan menjamin akses universal terhadap warisan dokumenter agar dapat dimanfaatkan dan dipelajari seluas-luasnya oleh dunia dan generasi yang akan datang. (an)



Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM (kiri) dan Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto (kanan) memperlihatkan berita acara penyerahan arsip statis film dokumenter "Pandit Nehru Visits Indonesia". (05/12/23).

ANRI MENERIMA ARSIP STATIS FILM DOKUMENTER "PANDIT NEHRU VISITS INDONESIA" DARI KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA

Jakarta (05/12) - Pelaksana Tugas (Plt) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, menerima arsip statis berupa film dokumenter berjudul "Pandit Nehru Visits Indonesia" dari Kedutaan Besar Australia. Penyerahan ini dilakukan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM.

Imam Gunarto menyatakan bahwa ini merupakan kali pertama kedutaan besar asing menyerahkan arsipnya ke ANRI, yang akan menjadi tambahan berharga untuk khazanah arsip nasional. Menurutnya, arsip ini bukan hanya sebagai sumber pengetahuan,

tetapi juga sebagai warisan dokumenter bersama antara Indonesia dan India.

Imam Gunarto juga menyoroti hubungan kuat antara Indonesia dan Australia dalam kerja sama kearsipan, terjadi selama puluhan tahun. ANRI telah menjadi mitra Arsip Nasional Australia, terlibat dalam pertukaran koleksi dan peningkatan kapasitas pengelolaan arsip.

Penny Williams menyampaikan terima kasih kepada ANRI atas penerimaan arsip tersebut dan penyelenggaraan acara ini. Wakil Duta Besar India untuk Indonesia,

Basir Ahmed, dan Direktur Produksi PT Produksi Film Negara, Sutjiati Eka Tjandrasari, juga turut hadir dalam kegiatan penyerahan arsip statis tersebut.

Arsip digital yang diserahkan dalam bentuk flashdisk ini dibuat oleh Perum Produksi Film Negara dan berisi film dokumenter tentang kunjungan perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, ke Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 7 hingga 17 Juni 1950. ANRI menyetujui penyerahan arsip ini karena memiliki nilai sejarah yang penting dan layak untuk disimpan dan dilestarikan. **(ndr)**

Mari Dukung Kami Wujudkan

”
**PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK
YANG
BERSIH MELAYANI
DALAM**

Direktorat Layanan & Pemanfaatan | Pusdiklat Kearsipan
Pusat Jasa Kearsipan | Direktorat SDM Kearsipan & Sertifikasi
Pusat Akreditasi

”
 www.anri.go.id  [ArsipNasionalRI](https://www.facebook.com/ArsipNasionalRI)  [@arsipnasionalri](https://twitter.com/arsipnasionalri)  [arsipnasionalri](https://www.instagram.com/arsipnasionalri)  [Arsip Nasional RI](https://www.youtube.com/ArsipNasionalRI)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

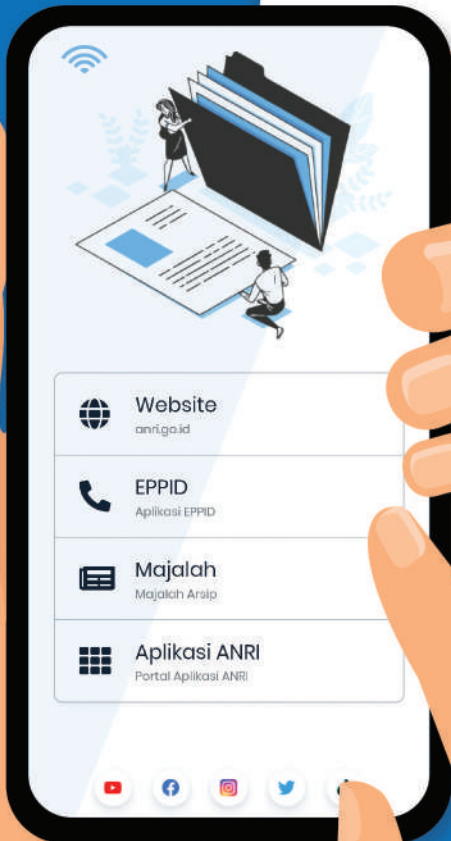


DOWNLOAD APLIKASI **klik anri**



FITUR :

- www.anri.go.id
- e-PPID ANRI
- Unduh Majalah ARSIP
- Jurnal Kearsipan
- Antrian Online
- Ruang Baca
- SRIKANDI
- Diorama Sejarah
- Perjalanan Bangsa
- JIKN
- Sejarah Nusantara
- JDIH ANRI



download sekarang di :

